

343.04  
816  
u e1

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN  
SISTEM SELF-ASSESSMENT  
( STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DEMAK )**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**SUKARDI, SH  
NIM. B4A 000071**

**Program Kajian Hukum Ekonomi Dan Teknologi**

Pembimbing :

Prof. Dr. Miyasto, SU  
Noor Rahardjo, SH. M.Hum

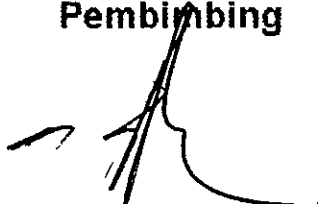
**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERORANGAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN  
SISTEM SELF-ASSESSMENT  
( STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DEMAK )**

**Disusun Oleh :**

**SUKARDI, SH.  
NIM. B4A 000071**

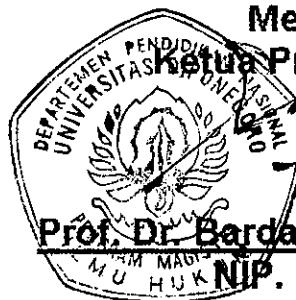
**Pembimbing**

  
**1. Prof. Dr. Miyasto.  
NIP. 130516585.**

  
**2. Noor Rahardjo, SH. M.Hum.  
NIP. 130675153.**

**Mengetahui :**

**Ketua Program M.I.H.**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130350519.**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

No. Dapt: 2345 / T / M I H / e /  
Tgl. : 4/3/04

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas berkat rahmat dan limpahan karunianya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister ilmu hukum.

Dengan selesainya tesis ini sebenarnya penulis telah berusaha segenap kemampuan agar dapat menyajikan tesis dalam bentuk dan materi sesempurna mungkin, akan tetapi masih juga banyak kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam pengolahannya. Oleh karena itu segala macam kritik dan saran sangat penyusun harapkan. Meskipun demikian dengan segala kerendahan hati penyusun berharap semoga tesis ini ada manfaatnya.

Dalam kesempatan ini pula penyusun ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada :

1. Bpk. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
2. Bpk. Prof. Dr. Miyasto.
3. Bpk. Noor Rahardjo, SH. Mhum.
4. Dosen program pasca sarjana magister ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

**Penyusun.**

## ABSTRAK

Bertumpu pada sistem perpajakan *self-assessment*, maka wajib pajak harus dapat mengatasi masalah perpajakannya secara mandiri. Untuk itu peneliti mengadakan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak. Mengingat bahwa mayoritas wajib pajak perorangan tersebut adalah hanya berpendidikan SLTA kebawah, dengan demikian apakah mungkin wajib pajak tersebut mampu memahami ketentuan perpajakan? Untuk itu peneliti tertarik mengadakan penelitian terhadap wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh manakah kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya? Bagaimanakah kondisi kepatuhannya serta apakah kepatuhan wajib pajak tersebut sudah menunjang sistem perpajakan *self-assessment*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek perpajakan oleh wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan, untuk mencari kejelasan pemahaman wajib pajak atas ketentuan perpajakan dan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan sistem perpajakan *self-assessment* oleh wajib pajak selama ini.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek teoritis maupun praktis yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum perpajakan dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang perpajakan yang lebih sederhana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang merupakan gabungan dari penelitian *yuridis-normatif* dan *yuridis-empiris* yang diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber dari bahan pustaka maupun dari pelaksanaan perundang-undangan.

Metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu dengan jalan mengumpulkan data *deskriptif-analistis* yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata dari wajib pajak yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa secara formal kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak adalah mematuhi ketentuan perpajakan, hal ini didukung data bahwa dari 50 responden terdapat 72 % sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dari wajib pajak tersebut yang telah mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 86,11 %, dan yang 14 % tidak mengisi maupun mengirimkan SPT-nya. Dari 14 % tersebut yang tidak mengisi maupun mengirim SPT-nya sebanyak 60% yang disebabkan karena kesengajaan wajib pajak dengan alasan bahwa wajib pajak lebih senang dijatuhi sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- daripada harus mengisi dan mengirimkan SPT-nya. Dari hasil analisa peneliti terhadap ketentuan perpajakan bahwa Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai sanksi denda terhadap wajib pajak yang tidak mengisi dan mengirim SPT-nya memang merupakan *loophole* atau celah yang dapat dipakai oleh wajib pajak untuk menghindar ataupun menggelapkan pajak, karena denda tersebut dirasa oleh wajib pajak lebih efisien daripada harus mengisi, mengirim SPT-nya dan membayar pajak. Disamping itu dari analisa peneliti mengenai besarnya sanksi denda tersebut adalah kurang mencerminkan keadilan, dimana wajib pajak adalah terdiri dari wajib pajak perorangan dan badan, tetapi kenapa besarnya sanksi denda tersebut disamaratakan, mestinya berbeda. Untuk itu peneliti sarankan kepada *stake-holder* pembuat perundang-undangan perpajakan agar sanksi denda tersebut di perbesar dan ada perbedaan tentang besaran denda antara wajib pajak perorangan dengan badan dan tentunya yang wajib pajak badan sanksinya lebih besar. Adapun dalam penentuan besarnya denda supaya ditentukan sebesar 10 kali dari besarnya pajak terutang setelah ditetapkan oleh *fiskus* berdasarkan hasil pemeriksaan, hal ini dimaksudkan agar lebih adanya kepastian efek penjeranya dan berlaku terus-menerus dengan demikian hukum berlaku tidak berubah-ubah atau bisa mengikuti perkembangan jaman.

Adapun tingkat pemahaman ketentuan perpajakan dari wajib pajak tersebut adalah masih rendah, terbukti dari 36 wajib pajak yang telah memiliki NPWP ternyata yang mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya 25 %. Untuk itu kami sarankan pula kepada *fiskus* untuk meningkatkan sosialisasi ketentuan perpajakan serta bimbingan teknis operasionalisasi perpajakan agar wajib pajak perorangan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## ABSTRACT

Convergent at taxation system *self-assessment*, hence taxpayer have to earn to overcome the problem of taxation self. For that researcher perform a research concerning compliance of individual taxpayer in Demak regency. Considering that the individual taxpayer majority is only education of under High Scholl, with that way do possible the taxpayer can comprehend rule of taxation? For that researcher interest to perform a research to individual taxpayer in Demak regency.

Problem is this thesis is as far as such compliance of individual taxpayer in Demak regency fulfilling taxation obligation? How its condition of him and also do compliance of the taxpayer have supported taxation system *self-assessment*?

Target of this research is to know taxation practice by taxpayer in knowing rule taxation, to look for clarity is understanding taxpayer rule taxation and to know how far execution of taxation system *self-assessment* by taxpayer during the time.

This research benefit is expected to earn input giving either from practical and also theoretical aspect able to give idea contribution to science specially revenue tax and expected can give input to maker of policy about more simple taxation.

This research use research method with approach representing alliance of research *yuridis-normatif* and *yuridis-empiris* which is purpose obtaining secondary data and primary data have a sources from book materials and also from execution of legislation

Method analysis data the used is *deskriptif-qualitatif method*, that is by way of collecting *deskriptif-analistis data* expressed by responder either through written and also target and also real behavior of accurate taxpayer and studied by as a intact.

Result of the research obtained by finding that formally of compliance of individual taxpayer in Demak regency is to obey rule of taxation, this matter is supported by data that from 50 responder there are 72% have registered self to get Tax Code Number, and from the taxpayer which have sent Annual Tax Return counted 86,11%, and which is 14% do not fill and also deliver this Annual Tax Return. This 14% the which do not fill and also deliver this Annual Tax Return counted 60% caused by intention of taxpayer with reason of that taxpayer more like to be fallen by sanction fine equal to one hundred thousand rupiah than have to fill and deliver this Annual Tax Return. Researcher analysis to rule of taxation that section 7 Laws number 16 the year 2000 about rule of taxation procedures and public concerning sanction fine to taxpayer which do not fill and send this Annual Tax Return it is true represent gap or *loophole* able to wear by taxpayer to refrain from and darkening lease, because the penalty felt by taxpayer more efficient than have to fill, sending Annual Tax Return and pay for lease. Beside that from researcher analysis regarding the level of the penalty sanction is less is expressing of justice, where taxpayer is consisting of individual taxpayer and body, but why level of the penalty sanction generalized, its his must differ. For that researcher suggest to *stake-holder* maker of legislation of taxation the to penalty sanction enlarge and there is difference about mulberry fine between individual taxpayer with body and it is of course which is its bigger sanction body taxpayer. There by will be more express justice. As for in determination of its level of penalty is 10 times in debt lease after specified by *fiskus* pursuant to result of inspection. this matter in order to effect discourage and go into effect continuously and unvaried or keep abreast of era. As for level of is understanding of rule of taxation of taxpayer is still lower, is proven from 36 taxpayer which have owned Tax Code Number the reality can execute obligation taxation of it only 25%. For that we suggest also to *fiskus* to increase socialization rule of taxation and also technical tuition of taxation operational to individual taxpayer can execute obligation of taxation

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	vi
<b>B A B I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Kerangka Teori	8
1.3.1. Pengertian dan Tinjauan Umum Tentang Pajak	8
1.3.2. Unsur-unsur Pajak	10
1.3.3. Fungsi Pajak	11
1.3.4. Asas-asas Pemungutan Pajak	13
1.3.5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia	16
1.3.6. Sistim Perpajakan Nasional	17
1.3.7. Pengertian <i>Self-assessment</i>	22
1.3.8. Faktor-Faktor Bekerjanya Hukum	23
1.3.9. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum	24
Pajak dari Wajib Pajak	
1.4. Tujuan Penelitian	25
1.5. Manfaat Penelitian	25
1.6. Metode Penelitian	26
1.7. Sistematika Penulisan Tesis	32
<b>B A B II : TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Kepatuhan Hukum	35
2.1.1. Dasar-dasar Kepatuhan Hukum	35
2.1.2. Kesadaran Hukum	43

2.1.3. Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Kepatuhan Hukum	44
2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	47
2.2.1. Wajib Pajak	47
2.2.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	48
2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak	50
2.2.4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	52
2.2.5. Subyek Pajak	53
2.2.6. Obyek Pajak	55
2.2.7. Masa Pajak	56
2.2.8. Tahun Pajak	56
2.2.9. Bagian Tahun Pajak	57
2.2.10. Surat Pemberitahuan	58
2.2.11. Surat Pemberitahuan Masa	60
2.2.12. Surat Pemberitahuan Tahunan	61
2.2.13. Surat Ketetapan Pajak	62
2.2.14. Pajak Terutang	69
2.2.15. Surat Paksa	70
2.2.16. Pemeriksaan Pajak	71
2.2.17. Pajak Penghasilan Pasal 21	73
2.2.18. Pajak Penghasilan Pasal 22	77
2.2.19. Pajak Penghasilan Pasal 23	82
2.2.20. Pajak Penghasilan Pasal 24	84
2.2.21. Pajak Penghasilan Pasal 25	85
2.2.22. Pajak Penghasilan Pasal 26	87
2.3. Sistem <i>Self-assessment</i>	89
2.3.1. Sistem <i>Oficial-assessment</i>	89
2.3.2. Sistem <i>Semi Self-assessment</i> Dan Sistem <i>With-</i>	

<i>holding</i>	90
2.3.3. Sistem <i>Full Self-assessment</i>	91
<b>B A B III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan	95
3.1.1. Jumlah Wajib Pajak Perorangan Di Kabupaten Demak	96
3.1.2. Pendaftaran NPWP.	96
3.1.3. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan	98
3.1.4. Penyelenggaraan Pembukuan Atau Pencatatan	102
3.1.5. Penerapan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Oleh Wajib Pajak Perorangan	104
3.1.6. Kejujuran Wajib Pajak Perorangan Dalam Mengisi/Mencantumkan Penghasilannya Di SPT	105
3.1.7. Kejujuran Wajib Pajak Perorangan Dalam Mencantumkan Pajak Penghasilan Yang Di Pungut Oleh Pemungut/Pemotong Pajak Penghasilan Pada SPT	107
3.1.8. Penyampaian SPT	113
3.1.9. Pembayaran Pajak	116
3.2. Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kabupaten Demak Terhadap Ketentuan Perpajakan Berkaitan Dengan Sistem <i>self-assessment</i> .	117
3.2.1. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Ketentuan Perpajakan	117
3.2.2. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>Self-assessment</i>	119
3.2.3. Pemeriksaan Pajak	120
3.2.4. Surat Ketetapan Pajak	121



3.2.5. Surat Tagihan Pajak & Surat Paksa	122
3.3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Menunjang Sistem <i>Self-assessment</i> di Kabupaten Demak	123
3.3.1. Pengambilan Surat Pemberitahuan Tahunan	123
3.3.2. Menghitung Sendiri/Menetapkan Sendiri Besarnya Pajak Terutang	126
3.3.3. Menyetor Sendiri Pajak Yang Terutang/Angsuran Pajak	127
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan.	129
4.2. Saran.	134

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang sangat penting, disamping minyak dan gas bumi, meskipun penerimaan dalam negeri sebagian diperoleh dari migas, namun prospek penerimaan pajak masa depan akan jauh lebih cerah jika dibandingkan dengan penerimaan pada migas. Pada masa silam, pajak dipergunakan untuk menggaji penguasa, memelihara tentara atau membayar pemerintahan kolonial yang kesemuanya bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dan saat sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Amin Widjaya Tunggal, 1995:1)

Masalah pajak itu adalah masalah negara, dengan demikian terhadap setiap orang yang hidup dan tinggal dalam suatu wilayah negara harus berurusan dengan masalah pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah terhadap seluruh rakyat yang tinggal dalam wilayah negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara harus mengetahui secara benar terhadap segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Pendek kata masalah pajak itu adalah masalah bagi kita semua.

Undang Undang Dasar 1945, Bab VIII, Hal Keuangan, Pasal 23, disebutkan bahwa, untuk pembiayaan penyelenggaraan negara, pemerintah tiap-tiap tahun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dalam sebuah Undang Undang. Juga sebagai arah kebijakan seperti yang ditetapkan dalam bidang ekonomi menetapkan antara lain adalah mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri (Tap MPR RI No.IV/MPR/1999, tentang Garis Garis Besar Haluan Negara 1999/2004, Bab IV Huruf B Angka 7).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2002, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2002, disamping mengacu pada arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 1999-2004, juga merupakan kelanjutan dari kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2002 sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, juga mempertimbangkan kinerja perekonomian dalam Tahun Anggaran 2001.

Berbagai perkembangan dibidang ekonomi dan non ekonomi memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap proses pemulihan ekonomi dalam Tahun Anggaran 2001. Disisi ekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah dan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cukup jauh dari asumsi dasar yang digunakan, memberikan tekanan dan hambatan yang cukup berat terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Sementara itu, terhambatnya pelaksanaan kebijakan fiskal, seperti tidak dapat diberlakukannya secara penuh rencana kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal April 2001, serta adanya pembatalan sebagian pencairan pinjaman program untuk mendukung pembiayaan pembangunan, juga turut memperberat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001. Selain itu, kondisi politik, sosial dan ekonomi didalam negeri yang kurang kondusif, yang ditandai dengan ketidak stabilan situasi politik dan terjadinya gejolak sosial di beberapa daerah, juga merupakan salah satu faktor penghambat upaya percepatan proses pemulihan ekonomi.

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 diarahkan pada beberapa sasaran pokok, terutama upaya untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), menciptakan stabilisasi ekonomi makro, memberikan stimulus terhadap kegiatan perekonomian dalam batas-batas kemampuan keuangan negara, serta mendukung proses

pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan, kemampuan antar daerah yang sepadan dengan penyerahan beberapa wewenang kepada Pemerintah Daerah, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Undang Undang No. 19 Tahun 2001).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja negara dan sekaligus untuk menjaga kemantapan dan kesetabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan dalam negeri, terutama dari penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai langkah, antara lain penyisiran (*canvassing*) terhadap kegiatan usaha disentra-sentra ekonomi tertentu, penyisiran terhadap berbagai objek pajak atau transaksi tertentu yang dapat dijadikan petunjuk tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas aparatur, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, penagihan secara aktif dan penegakan hukum (ANTARA, Warta Perundang-undangan, Edisi 2118/Th.XXI).

Untuk mengetahui secara riil tentang seberapa besar penerimaan negara disektor perpajakan pada Tahun Anggaran 2001 dan pada Tahun Anggaran 2002, - adalah sebagai berikut :

1.1.1. Penerimaan negara disektor perpajakan Tahun Anggaran 2001 adalah

sebesar Rp. 184.736.600.000.000,00.

Jumlah tersebut diperinci sebagai berikut :

- Pajak Dalam Negeri : Rp. 174.188.800.000.000,00;
- Pajak Perdagangan internasional : Rp. 10.547.800.000.000,00.

1.1.2. Penerimaan negara disektor perpajakan Tahun Anggaran 2002 diperkirakan sebesar Rp. 219.627.480.000.000,00.

Jumlah tersebut diperinci sebagai berikut :

- Pajak Dalam Negeri : Rp. 207.028.880.000.000,00.
- Pajak Perdagangan Internasional : Rp. 12.598.600.000.000,00.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas dikaitkan dengan sistem perpajakan *self-assessment* di Indonesia, dimana kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan, mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar, menghitung pajak penghasilan yang terutang serta membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam kas negara tanpa campur tangan pihak fiskus , sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka kepada wajib pajak untuk selalu jujur didalam melaksanakan *self-assessment* tersebut agar penerimaan negara selalu meningkat sehingga akhirnya pembangunan diberbagai bidangpun meningkat (Amin Widjaya Tunggal : 1995 : 42-43).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem perpajakan *self-assessment* adalah:

- Kesadaran pajak wajib pajak (*Tax Consciousness*);
- Kejujuran Wajib Pajak;
- Hasrat Untuk Membayar pajak (*Tax Minddeness*) dari wajib pajak;
- Disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak (*Tax Discipline*) sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Rochmat Soemitro, 1992 : 12).

Dipilihnya lokasi penelitian tentang Analisis Ketaatan Wajib Pajak di Kabupaten Demak adalah didasarkan atas data-data sebagai berikut:

- bahwa Kabupaten Demak yang luasnya 89.473 ha. dimana luas tersebut yang 51.603 ha. adalah tanah sawah dan yang 38.140 ha. adalah tanah agraris.
- Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2000 tercatat: 980.218 jiwa, yang usia produktif (umur 20 s/d 60 tahun) sebanyak: 210.239 jiwa, dan dari jumlah tersebut yang bergerak dibidang usaha industri produksi sampai dengan tahun 2000 sebanyak 6.850 jiwa dan yang bergerak dibidang perdagangan formal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (s/d tahun 2000)

sebanyak 1.256 jiwa.

- Belum lagi ditambah kurun waktu sebelumnya dan juga para pedagang informal, dimana jumlah tersebut terus meningkat (Demak Dalam Angka, 2001:4,34-38,180-181).

Jumlah usahawan tersebut diatas sebagian besar merupakan wajib pajak perseorangan.

- Latar belakang pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Demak, dimana sampai tahun 200 yang lulus SD sebanyak 324.883 jiwa, lulus SLTP sebanyak 117.344 orang, lulus SLTA hanya 79.802, D1, D2, D3 hanya 9.203 orang, D4/S1 hanya 7.874 orang, dan yang tidak sekolah: 74.652 orang.
- Jumlah tersebut yang bergerak dibidang usaha industri dan perdagangan mayoritas berpendidikan SD, SLTP dan SLTA (Demak Dalam Angka, 2001 : 51).

Data-data tersebut apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *self-assessment* adalah merupakan hal yang menarik untuk di laksanakan nya penelitian ini.

## **1.2. PERMASALAHAN**

Bertumpu dari latar belakang tersebut, dikaitkan dengan sistem perpajakan *Self-Assessment* apakah memungkinkan para wajib pajak perseorangan di Kabupaten Demak dapat melaksanakan kewajiban-



kewajiban perpajakannya sesuai yang digariskan pada ketentuan perpajakan? Untuk itu maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Sejauhmana kepatuhan wajib pajak perseorangan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan?
- 1.2.2. Bagaimanakah kondisi kepatuhan wajib pajak saat ini berkaitan dengan sistem *self-assessment*?
- 1.2.3. Apakah kepatuhan wajib pajak selama ini menunjang sistem *self-assessment* ?.

### **1.3. KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **1.3.1. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Pajak.**

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus tahu segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yaitu :

“Iuran pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Amin Widjaya Tunggal, 1995 : 1).

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. R. Soemitro, SH.

adalah :

"Iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (AA. Barata, AA.Ardian, 1989 : 1-5).

Definisi pajak diatas selalu berkaitan dengan kata "paksa" dan "imbalan" melalui ungkapan "iuran yang dapat dipaksakan, dan tanpa jasa timbal yang dapat ditunjuk". Maksud dari kalimat-kalimat tersebut adalah bahwa iuran yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa karena kekuatan undang-undang pajak maka rakyat yang karena ketentuan didalamnya wajib membayar iuran/pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sifa. Tanpa rasa timbal balik yang dapat ditunjuk mengandung arti bahwa setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi secara tidak langsung wajib pajak memperoleh pelayanan pemerintah yang ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib) melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, jembatan dan sebagainya (Amin Widjaya Tunggal, 1995 : 2).

Pajak diatur dalam undang-undang, oleh karena itu ia harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap serta pembuatan undang-undang pajak harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2000 : 1).

### **1.3.2. Unsur Unsur dan Ciri Ciri Pajak.**

Yang dimaksudkan dengan unsur adalah :

“sesuatu yang harus ada agar supaya sesuatu itu akan ada. Selanjutnya ciri adalah apa yang nampak dari luar kepada kita melalui panca indera kita.

Unsur-unsur pajak adalah :

- ada undang-undang pajak yang mendasari;
- ada penguasa pemungut pajak;
- ada subjek pajak;
- ada objek pajak;

- ada masyarakat/kepentingan umum;
- ada Surat Ketetapan Pajak.

Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak mungkin ada pajak. Maka semua unsur harus ada supaya akan ada pajak".

Ciri-ciri pajak adalah :

- dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung;
- dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang;
- dapat dipaksakan;
- tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk;
- untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara;
- dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat;
- penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan, termasuk kebijaksanaan, yang lazimnya disebut kebijaksanaan fiskal (Rochmat Soemitro, 1998 : 162).

### 1.3.3. Fungsi Pajak.

#### 1.3.3.1. Fungsi *Budgeter* (APBN).

Fungsi budgeter atau fungsi untuk mengisi kas negara mempunyai tugas memupuk dana demi memperlancar roda pemerintahan serta usaha pembangunan. Oleh karena itu demi memperlancar pembangunan, maka penerimaan dalam negeri, termasuk didalamnya penerimaan dari sektor perpajakan harus berhasil pula. Dengan berhasilnya pemerintah memupuk dana, berarti pemerintah berhasil pula dalam melancarkan roda pemerintahan, dengan demikian dapat mencukupi kebutuhan rutin. Kelebihannya merupakan

“tabungan pemerintah”, yaitu suatu dana yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan penerimaan pemerintah dari dalam negeri sebagian besar dihasilkan dari hasil pemungutan pajak-pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui pajak pemerintah dapat mengisi kas negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin, sedangkan kelebihannya yang merupakan tabungan pemerintah disediakan untuk memenuhi biaya pembangunan.

#### 1.3.3.2. Fungsi Mengatur (*Fiscal Policy*).

Dengan fungsi mengatur, pemerintah dapat mengarahkan kebijaksanaan fiskalnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang antara lain, ekonomi, sosial dan lainnya. Hal seperti inilah kini antara lain dilakukan pemerintah dalam usahanya mengundang para investor (penanam modal), baik asing maupun nasional agar bersedia menanam modalnya di Indonesia, dengan diberikan beberapa fasilitas di bidang perpajakan, misalnya pajak perseroan selama jangka waktu tertentu, bebas bea masuk, pajak penjualan impor dan sebagainya (Mardiasmo, 2001 : 2).

#### **1.3.4. Asas Asas Pemungutan Pajak.**

##### **1.3.4.1. Asas Keadilan.**

Pemungutan pajak harus dilakukan seadil-adilnya. Apa yang dinamakan adil adalah tidak mudah untuk menentukannya, karena arti adil adalah amat relatif, apa yang pada saat ini dinamakan adil mungkin sepuluh tahun kemudian tidak dinamakan adil lagi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan adil jika dilakukan secara umum dan merata, yaitu pemungutan pajak diperlakukan terhadap setiap orang, tanpa kecuali, sedangkan beban pajak harus dirasakan sama beratnya bagi setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Teori daya pikul mengatakan, bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang. Ukuran-ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur daya pikul seseorang adalah penghasilan atau kekayaan seseorang atau pengeluaran seseorang untuk konsumsi, sedangkan untuk menentukan besarnya utang pajak, agar terdapat tekanan pajak yang sama, dapat dipergunakan tarif pajak yang progresif sifatnya.

#### 1.3.4.2. Asas Keuangan.

Asas keuangan menitikberatkan pemungutan pajak pada fungsinya untuk mengisi kas negara supaya selancar mungkin, maka asas ini menentukan dua syarat agar tercapai tujuannya :

- biaya persepsi dari pemungutan pajak harus sekecil mungkin, agar sisa dari hasil pemungutan masih cukup besar untuk dapat memenuhi belanja negara;
- pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif, tepat pada waktunya, yaitu pada saat si pembayar pajak masih memiliki dana-dana cukup untuk membayar pajak maka pemungutan pajak harus dilakukan segera setelah terjadinya perbuatan, peristiwa atau keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

#### 1.3.4.3. Asas Ekonomi.

Kecuali pengisi kas negara maka pajak mempunyai fungsi lain yang ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan umum. Dalam hal ini maka pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi negara. Kebijakan dalam perpajakan harus disesuaikan dengan kebijakan negara dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu maka pemungutan pajak

harus memenuhi syarat-syarat ekonomis sebagai berikut:

- harus mendorong produksi dan perdagangan, sekali-kali tidak boleh merupakan penghambat jalannya roda perekonomian;
- harus mendorong rakyat dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- jangan sampai merugikan kepentingan umum.

#### 1.3.4.4. Asas Yuridis.

Asas yuridis mengatur hak dan kewajiban fiskus maupun pembayar pajak dengan tegas, ketentuan-ketentuan tersebut harus jelas dan sederhana, agar tidak menimbulkan salah tafsir. Hak fiskus untuk memungut pajak supaya berjalan dengan lancar, bagi pembayar pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya harus dapat ditindak dan dikenakan sanksi-sanksi. Sebaliknya hak pembayar pajak harus terjamin, agar wajib bayar pajak tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak fiskus. Rahasia perusahaan umpamanya jangan di bocorkan kepada pihak lain oleh fiskus.

#### 1.3.4.5. Asas Administrasi dan Teknik Pemungutan yang baik.

Pemungutan pajak yang baik dan lancar harus memperhatikan beberapa hal :

- perencanaan kerja dan pelaksanaannya harus sesuai



dengan kemampuan aparat perpajakan sendiri.

- prosedur pelaksanaan tugas harus sederhana dan jangan berbelitbelit.
- disamping itu semua administrasi perpajakan harus rapi.
- bagi pembayar pajak harus dibebani formalitas-formalitas sedikin mungkin dengan kewajiban-kewajiban tambahan yang amat perlu saja, tetapi kewajiban mutlak untuk membayar pajak harus dipegang teguh (Amin Widjaya Tunggal, 1995 : 32-34).

#### **1.3.5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia.**

Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang.

Di samping ketentuan pasal 23 (2), masih ada lagi dua ketentuan yang harus dipenuhi agar pungutan pajak merupakan pungutan yang sah, yaitu pasal 16 dan pasal 17 ICW (Indische Comptabiliteitswet, yang sekarang masih berlaku). Dalam kedua pasal itu ditentukan bahwa undang-undang tentang pungutan pajak

baru, penambahan atau pengurangan pajak tidak mungkin berlaku sebelum hasil penambahan atau hasil perubahan undang-undang pajak tersebut dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan (pasal 16 ICW), dan bahwa semua penghapusan dan pengurangan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan formal undang-undang seperti ditentukan dalam pasal 17 ICW. Kedua pasal ICW yang tersebut tadi merupakan syarat formal yang wajib dipatuhi (Rochmat Soemitro, 1998 : 7-8).

#### **1.3.6. Sistem Perpajakan Nasional.**

##### **1.3.6.1. Sebelum *Tax Reform* 1983.**

Sebelum dilakukan *tax reform* 1983, sistem peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia mengenai pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu :

- Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan.
- Ordonansi Pajak Pendapatan 1994, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam Ordonansi ini juga diatur pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan dari pegawai atau

karyawan dari pemberi kerja tersebut.

- Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti, yang wajib dipotong oleh orang-orang dan badan-badan yang membayarkan bunga, dividen, dan royalti yang bersangkutan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 Juncto Peraturan Nomor 11 Tahun 1967, yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak atas penghasilan, terutama berupa laba usaha, sepanjang mengenai tata cara pemungutan oleh pihak lain (MPO) dan pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri (MPS) dalam tahun berjalan serta perhitungan pada akhir tahun (MPS-Akhir).

Dalam sistem perpajakan ini adalah menggunakan sistem *official*, dimana fiskuslah yang menentukan pengenaan pajak (Rochmat Soemitro, 1993 : 255-256).

#### 1.3.6.2. Sesudah *Tax Reform* 1983.

*Tax reform* adalah pembaharuan perpajakan, yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang ada hingga

tanggal 1 Januari 1983, masih berlaku di Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia. Maka yang semula menggunakan sistim *ofisial* menjadi sistem *self-assessment*. Disamping itu juga dilatar belakangi oleh turunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak belum digali secara optimal.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, diatur :

- Semua ketentuan yang berkenaan dengan materi pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan, diatur dalam undang-undang ini.
- Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak baik berkenaan dengan Penghasilan, maupun berkenaan dengan pajak-pajak yang pengenaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Rochmat Soemitro, 1993 : 255-256).

Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah

masyarakat mempelajari, memahami dan mematuhi.

Kemudian *tax reform* yang ke-dua pada tahun 1994, melahirkan Undang Undang Nomor 9 tahun 1994, tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang mengubah Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang mengubah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengubah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983.

Reformasi pajak tahun 1994 merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Direktur Jenderal Pajak atas pelaksanaan selama 10 tahun reformasi perpajakan tahun 1983. Dalam diskusi menyongsong perubahan Undang Undang Perpajakan 1994 yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Dirjen Pajak mengemukakan hasil evaluasi antara lain sebagai berikut :

- Sistem *self-assessment* ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak perorangan, sehingga sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak;

- Ketidak suksesan sistem *self-assessment* terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun sebenarnya wajib pajak memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut;
- Untuk memaksa wajib pajak berlaku jujur, Undang Undang Perpajakan perlu memberikan pengenaan sanksi berat pada para pelanggar perpajakan, namun demikian sistem *self-assessment* tetap dilaksanakan (Hussein Kartasasmita, 1994 : 66-67).

Kemudian *tax reform* yang ketiga, yaitu pada tahun 2000, melahirkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang mengubah Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang mengubah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mengubah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai mana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengubah Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengubah Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Tax reform* yang ke-3 ini dilatar belakangi adanya keterpurukan ekonomi nasional, era reformasi, era demokrasi/keterbukaan dan era otonomi daerah (Miyasto, Kuliah Reguler Hukum Pajak, 5 Oktober 2000).

#### **1.3.7. Pengertian *Self-assessment*.**

Pada Pajak Penghasilan 1984 diterapkan metode *self-assessment*, yang berarti bahwa ciri dan corak sistim pemungutan pajak adalah sistim menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (Penjelasan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, TLN 3262).

Penghitungan dan penetapan pajak terutang oleh wajib pajak tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tanpa campur tangan pihak fiskus (Kantor Pelayanan Pajak).

Apabila dalam penghitungan dan penetapan pajak, setelah dikurangi dengan pemotongan pajak oleh pihak ke-3 dan/atau pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak masih ada pajak yang kurang dibayar, maka kekurangan tersebut harus sudah dilunasi oleh wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak yang bersangkutan lewat (Dirjen Pajak, 2001 : 5 ).

*Self-assessment* itu tidak akan diikuti oleh surat ketetapan pajak, kecuali apabila pemeriksaan administrasi pajak menunjukkan bahwa perhitungan wajib pajak tidak benar dan menyimpang dari ketentuan undang-undang pajak atau terbukti bahwa wajib pajak menyembunyikan sebagian dari penghasilannya/tidak memasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Maka dalam keadaan demikian, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak ditambah dengan denda (Rochmat Soemitro, 1992 : 71-72).

#### **1.3.8. Faktor Faktor Bekerjanya Hukum.**

1.3.8.1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

1.3.8.2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.



1.3.8.3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

1.3.8.4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

1.3.8.5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari bekerjanya hukum, serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 2002, : 3-5)

#### **1.3.9. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pajak Dari Wajib Pajak adalah :**

1.3.9.1. Kesadaran pajak wajib pajak.

1.3.9.2. Perkembangan intelektual dan moral wajib pajak.

1.3.9.3. Sistim perpajakan yang mungkin sulit dipahami wajib pajak

1.3.9.4. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2001 : 9).

#### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Untuk mengetahui praktek perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak pribadi/perseorangan dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.
- 1.4.2. Untuk mencari kejelasan pemahaman wajib pajak perorangan atas ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem *self-assessment* sehingga diperoleh data tentang kondisi kepatuhan wajib pajak saat ini.
- 1.4.3. Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan sistem *self-assessment* oleh wajib pajak perorangan didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis.

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum yang

mengatur tentang perpajakan/pajak penghasilan (PPh).

Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijaksanaan tentang perpajakan yang lebih memudahkan bagi wajib pajak di Kabupaten Demak pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas (khususnya para wajib pajak), dan dapat mendorong terciptanya peningkatan penerimaan pajak bagi negara untuk pembiayaan penyelenggaraan kenegaraan.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

### **1.6.1. Metode Pendekatan.**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari penelitian *yuridis-normatif* dan *yuridis-empiris* untuk menemukan hukum *in concreto* bagi peristiwa kongkrit tertentu mengenai pajak penghasilan dan untuk meneliti *sinkronisasi vertikal* dan *sinkronisasi horizontal* dari peraturan perundang-undangan hukum positif mengenai pajak penghasilan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 22-30).

Pendekatan *yuridis-normatif* diarahkan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari bahan pustaka yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1.6.1.1. Inventarisasi perundang-undangan/*yurisprudensi*;

1.6.1.2. Pendapat dari para sarjana, buku-buku;

1.6.1.3. Menganalisis berbagai perundang-undangan melalui pendapat para sarjana/ahli hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.

Sedangkan pada pendekatan *yuridis-empiris* diarahkan untuk memperoleh data primer yang bersumber dari pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut diri wajib pajak (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985 : 18).

Didalam metode pendekatan penelitian empirisnya adalah menggunakan paradigma kualitatif-induktif (S. Natution, 1996 : 7).

## 1.6.2. Cara Memperoleh Data.

### 1.6.2.1. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan :

Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh

dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan, seperti :

- Norma Dasar Pancasila;
- Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR;
- Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :
  - Kilap Undang Undang Hukum Perdata;
  - Undang Undang RI No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.
  - Undang Undang RI No. 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
  - Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta perubahannya.
  - Undang Undang RI No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa beserta perubahannya.
  - Undang Undang RI No. 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan beserta perubahannya.
- dan Peraturan Pelaksanaannya.

## Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Hasil-hasil penelitian;
- Buku-buku hasil karya para sarjana/pendapat para ahli hukum (Soerjono Soekanto, 1994 : 52).

### 1.6.2.2. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang langsung dari penelitian lapangan, dengan cara :

- Wawancara Terfokus, yaitu dengan para pejabat yang tugasnya terkait dengan pelaksanaan perpajakan, baik dari Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur maupun dari Kantor Penyuluhan Perpajakan Kabupaten Demak;
- Wawancara dengan Wajib Pajak;
- Observasi.

#### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.

Tenik pengumpulan data dengan menggunakan *Populasi* dan *sample*. Populasi terdiri :

- Para Pejabat dan
- Para Wajib Pajak.

Sedangkan Sample terdiri :

- Para pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur maupun pada Kantor Penyuluhan Pajak di Kabupaten Demak dan 50 wajib pajak perseorangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak yang mewakili responden.

#### 1.6.4. Metode Analisa Data.

Metode analisa data yang dipergunakan adalah metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu dengan jalan mengumpulkan data *deskriptif-analistis* yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (S. Nasution, 1996 : 128).

Penelitian *deskriptif-kualitatif* ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis penelitian menurut proses sifat dan analisis datanya, yaitu *riset-deskriptif* yang bersifat *eksploratif* dan *riset-deskriptif* yang bersifat *developmental* (Suharsimi Arikunto, 1998 : 245).

Berdasarkan keadaan dilapangan, dikaitkan dengan tujuan dari penelitian ini maka kami hanya akan mengadakan riset *deskriptif-kualitatif* yang bersifat *eksploratif* saja dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.6.4.1. Untuk menganalisa data seberapa jauh kepatuhan wajib pajak yang ada, peneliti akan menganalisa data wajib pajak secara sampling di Kabupaten Demak yang telah maupun yang belum melaksanakan ketentuan perpajakan, yaitu mengenai pelaksanaan laporan, baik laporan masa maupun laporan tahunan dari wajib pajak. Hal ini dimaksudkan bahwa laporan tersebut adalah merupakan sarana wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang maupun sebagai sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang sehingga dari analisis data ini peneliti akan mendapatkan data yang final mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk secara berkala menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa.

1.6.4.2. Untuk menganalisa kondisi wajib pajak saat ini yang meliputi tentang hambatan-hambatan yang menyebabkan wajib pajak tidak atau belum melaksanakan/mematuhi ketentuan



perpajakan yang berkaitan dengan sistem *self-assessment*, peneliti akan menganalisa data mengenai pemahaman wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan perpajakan, khususnya mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan ketentuan Pajak Penghasilan dan pemahaman sistem perpajakan *self-assessment*..

1.6.4.3. Untuk menganalisa data tentang operasionalisasi sistem *self-assessment* dari para wajib pajak perorangan didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga kami akan memperoleh data tentang seberapa jauh para wajib pajak mampu menerapkan sistem *self-assessment*.

## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS**

**B A B I :** menguraikan mengenai latar belakang penelitian kegunaan penelitian, metode penelitian, analisa data dan sistematika penelitian sebagai arah bagi penulisan ini.

**B A B II :** menguraikan telaah pustaka dimana didalamnya memuat berbagai teori dan pendapat-pendapat dari para ahli serta peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan, khususnya bagi wajib pajak perseorangan yang dikaitkan dengan sistem *self-assessment*. Dari uraian pada Bab II ini diharapkan dapat

membantu penulis menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

**B A B III :** berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan (1) berapa jumlah wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak. (2) Jumlah wajib pajak perorangan yang telah dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan sehingga diperoleh data mengenai kepatuhan wajib pajak didalam melaksanakan pelaporan-pelaporan (baik pelaporan surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa). (3) Pemahaman wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan sehingga diperoleh data mengenai permasalahan ketidak mampuan wajib pajak perorangan didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (4) Sejauhmana penerapan yang dilakukan oleh wajib pajak atas sistem perpajakan *self-assessment* apa sudah sesuai dengan sistem tersebut atau tidak, jika belum tentunya akan menyebabkan kurang bisa menunjang dari pada pelaksanaan sistem perpajakan *self-assessment*.

**B A B IV :** bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini yang menyangkut pelaksanaan perpajakan, khususnya bagi wajib pajak perseorangan yang berkaitan dengan sistem *self-assessment*.

## **B A B II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Kepatuhan Hukum.**

##### **2.1.1. Dasar Dasar Kepatuhan Hukum.**

Dasar-dasar kepatuhan hukum adalah (R. Bierstedt 1970 : 227-229) :

###### **2.1.1.1. *Indoctrination*;**

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaerah-kaerah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedar-kaerah tersebut.

#### 2.1.1.2. *Habituation.*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

#### 2.1.1.3. *Utility.*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari,

2

bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

#### 2.1.1.4. *Group Identification.*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Dalam hal ini Propisil menyatakan (L. Propisil, 1971 : 196) :

"A Law is Internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stand for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at least feels that he has done wrong that he has behaved improperly. He would not condeone such behavior in law is not usually effected by external mechanism which we may call xonscience in some cultures and fear of shame in oters."

Proses internalisasi diulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perkelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal daripada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Yang esensial pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respons yang diinginkan melalui imbalan dan bilangnya respons-respons terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan demikian. Jadi hanya respons-respons yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respons-respons yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama kelamaan hilang.

Piaget melihat proses belajar tidak sebagai konsekuensi daripada kekuatan superego dan dari penggunaan sistem imbalan secara sistematis. Seseorang individu taat pada kaedah-kaerah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal-balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya, karena merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial

yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perilaku kelakuannya (J. Piaget, 1948 : 195-325). Kenyataannya adalah bahwa kedua hal tersebut diatas berlaku. Disatu pihak diperlukan sanksi-sanksi negatif dan positif bagi penerapan kaedah-kaedah. Akan tetapi di lain pihak juga diperlukan suatu perasaan keadilan agar manusia mentaati kaedah-kaedah tersebut.

Selanjutnya Wallace berpendapat, bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaedah-kaedah hukum tertentu (A.F.L. Wallace, 1965 : 129-130).

Beberapa ahli antara lain Hovland, Janis dan Kelly berpendapat, bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi taat pada hukum (C.I. Hovland, I.L. Janis and H.H. Kelly, 1968 : 144-147).

Sebenarnya keinginan tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu juga terjadi karena adanya suatu kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan



kelompoknya, karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan diluar kelompoknya, karena kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila dia berada diluar kelompok dan karena ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhinya dari kelompok. Mereka kemudian berpendapat, bahwa :

"..... a person internalizes the norm of a group to the degree that he finds positive attractions in holding membership in it."

Ternyata bahwa kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan kelompok, mendapatkan bermacam-macam tanggapan. Tanggapan-tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok-kelompok tersebut, dan bukan merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu : (H.C. Kelman, 1966 : 140-148).

- *Compliance;*
- *Identification;*
- *Internalization.*

*Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukuman yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

*Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk-baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum. Tentang hal ini Mowrer berasumsi bahwa :

"If one is identified with a force of which one is afraid, one can no longer be hurt by it" (H.O. Mowrer, 1950 : 592).

Pada *internalization* seseorang mematuhi kaerah-kaerah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tentang proses ini Pospisil berpendapat bahwa (L. Pospisil, 1971 : 201-202) :

"Internalization of a rule for behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in which the individual either breaks the rule on the spur of the moment, without much thinking, or he consciously compromises a moral ... conviction for an immediate, and .... strong enough reward".

Teori-teori tersebut diatas berorientasi pada psikologi, akan tetapi sangat penting dalam pembahasan tentang kepatuhan hukum.

Didalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan kedalam teori paksaan (*dwang theorie*) dan teori konsensus (*consensus theorie*). Salah seorang tokoh dari teori paksaan adalah Max Weber yang bertitik tolak pada asumsi, bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-

sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Tentang hal itu Max Weber menyatakan bahwa :

"An order will be called law if it is externally guaranteed by the probability that coercion (physical or psychological), to bring about conformity or average violation, will be applied by a staff or people holding themselves specially ready for that purpose" E. Shils and M. Rheinstein, 1967 : 5).

Banyak pendapat-pendapat lain seperti dari Kantorowicz, Stone, Cardozo dan lain-lain, yang menekankan bahwa sumber penerapan hukum adalah masyarakat (C.J.M. Schuyt, 1971 : 152).

#### 2.1.2. Kesadaran Hukum.

Konsepsi Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (P. Scholten, dalam Soerjono Soekanto, 1977 : 152).

Suatu konsepsi lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*) yang kegunaannya

adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih luas. Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia dalam masyarakat. Hal ini memerlukan penguraian sedikit tentang nilai-nilai dan berprosesnya nilai-nilai tadi menjadi hukum (Soerjono Soekanto, 1977 : 154).

### 2.1.3. Hubungan Antara Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum.

Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu aspek dari suatu persoalan yang lebih luas yaitu masalah kesadaran hukum. Ada suatu asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum itu ditentukan oleh kadar hukum seseorang yaitu suatu pengetahuan atau pemahaman terhadap substansi hukum. Bagaimana orang dapat mematuhi hukum, kalau tidak dimulai dari

memahami apa itu hukum. Biasanya kemampuan untuk memahami hukum secara rasional diikuti pula dengan kemampuan untuk menilai apa isi hukum itu.

Selain yang disebut diatas ada sementara pihak yang menganggap bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan oleh karena rasa takut pada sanksi yang dikenakan kepada sipelanggar, atau dapat juga ia mematuhi karena ingin memelihara hubungan baik dengan kelompoknya, atau mungkin juga karena kepentingannya terjamin dan terlindungi atau karena kaedah nilai-nilai yang diatur oleh peraturan hukum itu sesuai dengan apa yang dianutnya. Untuk menentukan hal ini, maka seseorang harus dapat memahami lebih dahulu isi hukum, jadi harus ada kesadaran hukum terlebih dahulu..

Kesadaran hukum anggota masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat yaitu dapat berupa kepatuhan atau ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum termasuk kedalam kategori nilai-nilai serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau kalau dihubungkan dengan pendapatnya Friedman maka ia masuk dalam kategori apa yang dinamakan sebagai kultur hukum. Kesadaran masyarakat kiranya dapat dibentuk melalui berbagai cara, misalnya :

- Dengan mengkomunikasikan suatu peraturan hukum secara intensif kepada rakyat;

- Tergantung kepada aktivitas para pelaksana hukum.

Peraturan hukum itu sendiri memegang peranan yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam rangka pembentukan kesadaran hukum rakyat. Hal ini penting khususnya pada penerapan berlakunya hukum modern dewasa ini. Untuk itu maka setiap peraturan hukum disyaratkan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

2.1.3.1 Peraturan hukum itu harus dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat;

2.1.3.2. Peraturan hukum itu kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat;

2.1.3.3. Peraturan hukum itu mudah penataannya;

2.1.3.4. Peraturan hukum itu mudah penghayatannya, dan

2.1.3.5. Peraturan hukum itu mudah dalam penegakkannya (Arif Hidayat, 1993 : 6).

Demikian juga Lon Fuller mengemukakan bahwa peraturan hukum itu harus mengandung beberapa persyaratan nilai-nilai yang olehnya disebut "Delapan Prinsip Legalitas" yang meliputi :

2.1.3.1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;

2.1.3.2. Pengumuman itu harus diumumkan secara layak;

2.1.3.3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;

2.1.3.4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dimengerti oleh rakyat;

2.1.3.5. Hukum itu tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak

mungkin;

2.1.3.6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan;

2.1.3.7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;

2.1.3.8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang dibuat (Satjipto Rahardjo, 1980 : 78).

Dari uraian diatas maka dapat di hubungkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan hukum perpajakan adalah terinci dalam faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pajak dari wajib pajak adalah :

2.1.3.1. Kesadaran pajak wajib pajak;

2.1.3.2. Perkembangan intelektual dan moral wajib pajak;

2.1.3.3. Sistim perpajakan yang mungkin sulit dipahami wajib pajak, dan

2.1.3.4. Sistim kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2001 : 9)

## **2.2. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.**

### **2.2.1. Wajib Pajak.**

Wajib pajak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang Undang Nomor



6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *Tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dalam rangka Undang Undang Pajak Penghasilan 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak bagi wajib pajak dala negeri.

Jadi jika dirumuskan, wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak. Sebab, untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak itu harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (Rochmat Soemitro, 1998 : 62-63).

#### 2.2.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak adalah : a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar; c. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan; d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan; e. Jika diperiksa wajib :

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan meberibantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

f. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak Hak Wajib Pajak adalah :

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan SPT;
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang

salah. i. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. j. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan Pph pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak (Mardiasmo, 2001 : 40-41)

### 2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak, surat menyurat dalam hubungan perpajakan dan dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Semua wajib pajak berdasarkan sistem *Self-Assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak orang pribadi atau badan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP, dan orang pribadi atau badan tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. jangka waktu pendaftaran NPWP adalah selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak dan selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha dijalankan bagi wajib pajak badan.

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. NPWP dapat hapus karena : a. wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan; b. wanita kawin dengan tidak pisah harta atau penghasilan; c. warisan telah selesai dibagi; d. badan dibubarkan sampai dengan

penyelesaian likuidasi dan e. bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap (BUT) (Mardiasmo, 2001 : 16-17).

#### 2.2.4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Setiap pengusaha yang berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan.

Adapun fungsi dari NPPKP adalah : a. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. b. Untuk pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah. c. Untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Bagi pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi pengusaha badan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Jika pengusaha orang pribadi atau badan mempunyai tempat kegiatan usaha diwilayah beberapa kantor

Direktorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak pengusaha telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya, dapat diterbitkan NPPKP secara jabatan.

Kewajiban melaporkan untuk didudukkan menjadi PKP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu melaporkan adalah selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha dimulai.

Adapun sanksi bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPPKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Mardiasmo, 2001 : 18-19).

#### 2.2.5. Subyek Pajak.

Pengertian subjek pajak adalah lain dari wajib pajak. Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan subjek pajak, tetapi pengertian wajib pajak dijelaskan sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak.

Sedangkan subjek pajak dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan secara panjang lebar, yaitu Pasal 2 (1) menentukan yang menjadi subjek pajak dalam Pph adalah:

- a. Orang pribadi atau perorangan; b. Warisan yang belum terbagi, sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak; c. Badan, yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan, dan terdiri dari : 1. Perseroan Terbatas (PT), Naamlose Vennotschap (NV); 2. Perseroan Komanditer; 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN, berupa Perjan, Persero dan Perum); 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 5. Persekutuan (Maatschap); 6. Perseroan atau perkumpulan lainnya (Vennootschap atau organisasi lainnya), baik berbadan hukum ataupun tidak; 7. Firma, kongsi; 8. Perkumpulan koperasi; 9. Yayasan atau lembaga. d. Bentuk usaha tetap. Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat menjadi subjek pajak. Orang gila, anak yang masih

dibawah umur, dapat menjadi subjek atau wajib pajak, tapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kewajiban-kewajibannya (Rochmat Soemitro, 1998 : 61-62),

#### 2.2.6. Objek Pajak.

Yang dapat dijadikan objek pajak banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Objek pajak dapat dibedakan menjadi objek pajak langsung dan objek pajak tidak langsung. Pada pajak tidak langsung, besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya (misalnya Cukai, PPN), tetapi objeknya saja yang menentukan. Pada pajak langsung besarnya pajak yang dikenakan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak (kawin, tidak kawin, kawin mempunyai anak, dan sebagainya).

Walaupun segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak, namun pemerintah harus sangat hati-hati dalam menentukan objek pajak. Jangan sampai penentuan objek pajak dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat atau menghambat perekonomian. Jadi dalam menentukan objek mana atau objek apa yang akan dikenakan pajak, harus bertindak sangat hati-hati, dan harus mengadakan penelitian sebelumnya secara cermat. Objek pajak harus didefinisikan secara



tepat, sehingga tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lain daripada maksud pembuat undang-undang. Bahasa hukum, susunan kata dan penggunaan istilah dalam hal ini sangat menentukan. Ringkasnya yang menjadi objek pajak adalah pendapatan, perseroan, penghasilan, kekayaan, penjualan, pertambahan nilai. rumah tangga, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, anjing, sepeda, jalan, wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri dan yang tak tercakup oleh traktat pajak (Rochmat Soemitro, 1998 : 101-113)

#### 2.2.7. Masa Pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Jangka waktu itu adalah bagian dari tahun, jadi kurang dari satu tahun. Tahun pajak lazimnya satu tahun penuh, atau jangka waktu 12 bulan berturut-turut (tahun buku). Jadi kalau ada orang yang datang dari luar negeri dan menetap di Indonesia pada tengah tahun, atau orang Indonesia pada tengah tahun meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk semala-lamanya, maka pada orang itu terdapat masa pajak, dan pajaknya disesuaikan dengan masa pajak itu (Rohmat Soemitro, 1998 : 66).

#### 2.2.8. Tahun Pajak.

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun, yaitu 12 bulan

berturut-turut, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Lazimnya tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim atau tahun kalender, tetapi ada kalanya juga tahun pajak disamakan dengan tahun buku.

Tahun buku adalah suatu jangka waktu tertentu, biasanya 12 bulan berturut-turut, yang digunakan untuk dasar pembukaan perusahaan untuk mengadakan administrasi keuangan, dan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung laba-rugi perusahaan (Rochmat Soemitro, 1998 : 66).

#### 2.2.9. Bagian Tahun Pajak.

Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak. Hal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban pajaknya selama orang itu berada diluar negeri (untuk sementara) tidak melebihi jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Ada pula pendapat bahwa jangka waktu itu 183 hari, sesuai dengan kelaziman didunia pajak internasional, tetapi berdasarkan kelaziman dan yurisprudensi di Indonesia, jangka waktu itu adalah 12 bulan.

Dalam traktat, orang luar negeri yang berada di Indoneisa untuk jangka waktu lebih dari 183 hari (6 bulan) dianggap menjadi wajib pajak dalam negeri (Rochmat Soemitro, 1998 : 67).

#### 2.2.10. Surat Pemberitahuan.

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan atau SPT itu lazim dalam pajak-pajak langsung. Dalam pajak tidak langsung dihitung sendiri dan dibayar oleh wajib pajak seperti Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai dan sebagainya. Yang ada pada pajak tidak langsung ialah laporan yang harus dikirimkan oleh wajib pajak kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan untuk memberitahukan bahwa telah dibayar pajak tidak langsung, seperti halnya pada Pajak Penjualan 1951 dan Pajak Pertambahan Nilai 1984 karena terjadinya hal-hal yang kena pajak. Bahkan pada Bea Meterai laporan semacam ini tidak diperlukan.

Surat Pemberitahuan ini merupakan bentuk kerjasama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan Undang Undang Pajak Pendapatan 1944, wajib pajak memberikan data-data dalam SPT, dan Kantor Inspeksi Pajak kemudian menentukan besarnya pajak yang terutang dengan Surat Ketetapan Pajak.

Sistem ini dalam Undang Undang Pajak Penghasilan diubah menjadi sistem *self-assessment*. Wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak, dan penghitungan ini dimasukkan kedalam SPT. Kantor Inspeksi Pajak tidak wajib menetapkan jumlah pajak yang terutang, tetapi

mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila ternyata data-data atau penghitungan yang diberitahukan dalam SPT tidak benar atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Ditinjau dari segi hukum, memasukan SPT versi lama bukan merupakan perbuatan hukum karena tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Tetapi kalau SPT itu tidak benar atau memuat hal-hal yang palsu atau dipalsukan, wajib pajak dapat dijatuhi sanksi atau dituntut dimuka pengadilan.

Memasukkan SPT berdasarkan undang Undang Pajak Penghasilan 1984 merupakan suatu perbuatan hukum, yang menimbulkan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang dihitung sendiri berdasarkan wewenang *self-assessment*. Disini utang pajak timbul karena undang undang sendiri pada saat dipenuhi *taxes due* pada akhir tahun atau pada akhir masa pajak seperti ditentukan oleh undang-undang, sedangkan besarnya utang ditentukan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan data-data yang relevan dengan Pajak Penghasilan. Sekali jumlahnya ditetapkan, mengikat wajib pajak, dan harus dibayar sekaligus sebelum SPT dimasukkan.

Surat pemberitahuan harus dimasukkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila hal ini tidak mungkin karena suatu hal, harus dimintakan penundaan pemasukkan SPT dari Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan dan untuk ini Kepala Kantor Inspeksi Pajak harus memberikan izin tertulis (Rochmat Soemitro, 1998 : 67-68).

#### 2.2.11. Surat Pemberitahuan Masa.

Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa atau dalam bagian dari satu tahun. Kalau wajib pajak tidak satu tahun penuh menjadi wajib pajak karena baru datang di Indonesia setelah tahun pajak mulai, atau meninggalkan Indonesia atau meninggal dunia sebelum tahun pajak berakhir, maka pajaknya dihitung dari masa pajak yang kurang dari satu tahun. Untuk itu wajib pajak harus memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa pajak itu harus diberitahukan dalam SPT Masa, dan selanjutnya dihitung penghasilan setahun dengan mengalikan penghasilan dalam masa pajak itu dengan suatu pecahan yang pembilangnya 12 dan penyebutnya sama dengan jumlah bulan dari masa pajak itu. Umpamanya  $12/7$ . Dari penghasilan tahunan itu dihitung jumlah pajak yang terutang dalam masa tahunan. Kemudian untuk menghitung pajak yang terutang dalam masa pajak itu, utang pajak tahunan dikalikan dengan suatu pecahan yang pembilangnya adalah jumlah bulan dari masa pajak, sedangkan penyebutnya adalah 12 (=jumlah bulan dalam satu tahun), contohnya  $7/12$ .

Surat pemberitahuan masa dalam pajak pertambahan nilai mempunyai arti lain. Pengertian masa disini bertalian dengan masa pajak, yang mempunyai arti suatu jangka waktu yang lamanya sama dengan satu

bulan takwim. Jadi surat pemberitahuan masa dalam PPN adalah surat pemberitahuan yang harus dimasukkan setiap bulan oleh pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai laporan bulanan (Rochmat Soemitro, 1998 : 69).

#### 2.2.12. Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, penghitungan penghasilan kena pajak, dan akhirnya jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun pajak (hanya untuk Pph). SPT Tahunan sudah pasti memuat data-data yang positif dari tahun tertentu dan pula secara positif memuat jumlah yang terutang dari tahun yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan Pph tahun tertentu merupakan dasar hukum pajak atau akhir masa pajak. Surat pemberitahuan tahunan harus dimasukkan setiap tahun dalam jangka waktu tertentu, seperti ditentukan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984. Untuk pajak-pajak lain, umpamanya PRT atau Ipeda, memasukkan SPT bukan merupakan perbuatan hukum karena dengan memasukkan SPT tidak timbul utang pajak dengan sendirinya, tetapi masih akan disusul dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Inspekti Pajak yang menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Jadi sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa sifat surat

pemberitahuan tidak sama untuk setiap jenis pajak. Yang diuraikan dalam Pasal 1 huruf (f) dan huruf (h) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, adalah khusus untuk pajak penghasilan 1984. Kita tidak boleh lupa bahwa ketentuan yang dimuat dalam UU no. 6 tahun 1983 adalah ketentuan yang bersifat umum yang berlaku untuk semua jenis pajak. Maka pada ketentuan yang dimuat dalam huruf (f) dan (h), karena ini mengenai pajak penghasilan, seharusnya dimuat dalam undang undang pajak penghasilan 1984, sebab merupakan ketentuan yang khusus berlaku untuk pajak penghasilan dan tidak dapat diterapkan terhadap pajak kekayaan, pajak lpeda, Pajak Rumah Tangga, dan sebagainya (Rochmat Soemitro : 1998 : 70).

#### 2.2.13. Surat Ketetapan Pajak.

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkat SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan bila : 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran. 3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan Ppn

BM ternyata tidak harus dikompensasikan seluruh lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %. 4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Sanksi Administrasi apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Sanksi administrasi apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan diterbitkannya SKPKB diluar alasan tersebut diatas maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- 50% dari Pph yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
- 100% dari Pph yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut atau disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- 100% dari PPN dan Ppn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Fungsi SKPKB adalah sebagai koreksi jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi dan alat untuk menagih pajak.



Jangka waktu penerbitan SKPKB adalah jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Mardiasmo, 2001 : 28-29).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila: 1. berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. 2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

Apabila terdapat jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila

SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Adapun jangka waktu penerbitan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT.

Dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKBT ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Mardiasmo : 2001 : 30)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Penerbitan SKPLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

Adapun tata cara menerbitkan SKPLB, perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah : a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pajak. b. KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB dalam Waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima. c. Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka wajib pajak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permohonannya (sudah dianggap) dikabulkan. d. Dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima Ditjen Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan wajib pajak SKPLB ini dikirim kepada wajib pajak dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan. e. KPP menerbitkan surat perintah membayar kembali pajak dalam waktu satu bulan setelah menerbitkan SKPLB. f. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang. Disamping itu wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang (dikompensasi). g. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak SKKPP diterbitkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut (Mardiasmo, 2001 : 31-32).

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak (Mardiasmo : 2001 : 32).

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP dikeluarkan apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi

selengkapnya faktur pajak.

Adapun fungsi dari STP adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan sebagai alat untuk menagih pajak.

Sanksi administrasi STP terhadap jumlah kekurangan pajak yang terutang pada pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Terhadap pengusaha kena pajak yang berdasarkan undang undang pajak pertambahan nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha pajak tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Dalam hal STP dikeluarkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga, namun khusus bagi wajib pajak

yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga tidak lagi dikenakan sanksi, karena dalam undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan denda.

STP ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa (Mardiasmo : 2001 : 32-33).

#### 2.2.14. Pajak Terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang tidak tentu berdasarkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak yang tidak menerima surat ketetapan pajak (SKP) yang memuat jumlah pajak yang terutang, pajaknya sesuai dengan jumlah pajak yang dihitung sendiri dan diberitahukan dalam SPT. Bagi pajak-pajak tidak langsung jumlah pajak yang terutang juga ditentukan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pajak yang terutang yang harus dipotongkan atau dipungut pada waktu pembayaran, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, jadi pajak yang terutang dapat dihitung sendiri melalui sistem *self-assessment* (Pph), atau langsung berdasarkan ketentuan undang-undang pajak tidak langsung, atau berdasarkan SKP, STP, SKPT (Rochmat Soemitro, 1998 : 76).

#### 2.2.15. Surat Paksa.

Surat paksa adalah surat ketetapan (*beschikking*) untuk membayar pajak dan tagihan pajak yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan undang undang No. 19 Tahun 1997.

Surat paksa adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim. Tetapi dalam hukum pajak surat paksa dapat langsung ditetapkan tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Ini disebut *parafe executie* atau eksekusi langsung. Surat paksa ini dpat diterapkan baik untuk pajak langsung maupun untuk pajak tidak langsung. Definisi surat paksa adalah sebagai berikut : "Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai tiitel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam surat paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa, dengan ancaman sita atau sandera." Tiitel eksekutorial artinya bahwa surat keputusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Surat paksa itu sama dengan keputusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan segera dapat dilaksanakan, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk melawan surat paksa itu. Jadi surat paksa secara material tidak dapat ditentang, akan tetapi jika terdapat kekurangan kekurangan formal, surat paksa

masih dapat ditentang, umpamanya tidak diberitahukan secara resmi, tidak ditandatangani oleh yang berwenang, tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan dan sebagainya (Rochmat Soemitro, 1998 : 76-77).

#### 2.2.16. Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya : a. Interpretasi Undang Undang yang tidak benar; b. Kesalahan hitung; c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan; d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan adalah : a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.
2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Surat pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak.
4. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada (a.2) tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam



rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal : 1. Pemberian NPWP atau pencabutan NPWP; 2. Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pencabutan pengukuhan PKP. 3. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi wajib pajak baru. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding; 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah tertentu. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan pasal 21. 9. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain pada (b.1) sampai dengan (b.8) (Mardiasmo, 2001 : 37-38).

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut : a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. b. Wajib pajak yang diperiksa harus : 1. Menunjukkan, meminjamkan buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lainnya. 2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan. 3. Memberi keterangan yang diperlukan. 4. Kewajiban untuk merahasiakan tidak berlaku. c. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut diatas.

#### 2.2.17. Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan -pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : a. Pejabat Negara, meliputi : b. Pegawai Negeri Sipil; c. Pegawai; d. Pegawai Tetap; e. Pegawai Lepas; f. Penerima Pensiun; g. Penerima Honorarium; h. Penerima Upah.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah: a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,

uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, grafitasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah brongan. d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis. e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari: - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/wati, pemain drama, penari,

pemahat, pelukis dan seniman lainnya. - Olah ragawan. - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator. - Pengarang, peneliti, dan penerjemah. - Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran. - Agen iklan. - Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. - Agen iklan. - Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. - Peserta perlombaan. - Petugas penjaja barang dagangan. - Petugas dinas luar asuransi. - peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan. f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS. g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya. h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 atau yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : a. Pembayaran asuransi dari perusahaan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan haritua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah. e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. f. Pembayaran tunjangan hari tua-Taspen dan tunjangan hari tua-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan adalah : a. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari : - Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. - Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. - Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai. b. Tarif sebesar 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan,

arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. c. Tarif sebesar 10% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,- sehari tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,- dalam satu bulan takwin dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. d. Disamping itu terdapat tarif pasal 21 yang bersifat final untuk beberapa jenis penghasilan, yang besar persentasenya tidak sama yang selalu di hitung dari penghasilan bruto.

#### 2.2.18. Pajak Penghasilan Pasal 22.

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Sedangkan pemungut PPh pasal 22 adalah: a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. b. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. c. BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. d. Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri. e. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya. f. Badan Urusan Logistik, atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

Yang merupakan obyek pemungutan PPh pasal 22 adalah : a. Impor barang. b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. d. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif. e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. f. Penyerahan gula pasir dan tepung terigu Badan Urusan Logistik.

Adapun tarip PPh pasal 22 adalah berbeda terhadap masing-masing obyek PPh pasal 22. Besarnya tarip tersebut dapat dirinci : a. Besarnya PPh pasal 22 atas impor : - Yang menggunakan API, tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor. - Yang tidak menggunakan API tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.

- Yang tidak dikuasai, tari pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Impor barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah: - Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. - Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk bagi barang-barang sebagai berikut: - Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. - Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subyek pajak penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. - Buku ilmu pengetahuan. - Barang kiriman hadiah untuk keperluan badan umum, amal, sosial, atau kebudayaan. - Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu penerahuan. - Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya. - Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. - Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. - Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. - Barang pindahan. - Barang



pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu. - Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. - Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. b. Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau

belanja daerah dikenakan pungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. c. Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih didalam negeri adalah sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan nilai. d. Atas industri rokok pada saat penjualan rokok didalam negeri besarnya PPh pasal 22 sebesar 0,12 dari bandrol (pita cukai) dan bersifat final. e. Atas industri kertas pada saat penjualan kertas didalam negeri dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,1% dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai. f. Atas industri semen pada saat penjualan semen didalam negeri dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai. Kecuali penjualan semen dalam negeri oleh PT Indocement, PT Semen Cibinong, dan PT Semen Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya. g. Atas penjualan hasil produksi industri baja pada saat penjualan hasil

produksinya didalam negeri dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai. h. Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak, premix dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut : - Atas penebusan premium, solar,premix oleh SPBU swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan. - Atas penebusan premium,solar,premix oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan. - Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan. Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan/penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya (misalnya pabrikan) pemungutannya tidak bersifat final, sehingga PPh pasal 22-nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Sedangkan besarnya Pph pasal 22 yang wajib dipungut oleh BULOG atas penyerahan : - Gula pasir kepada: - penyalur adalah Rp. 380,- per kuintal, dan bersifat final. - grosir adlah Rp. 270,- per kuintal, dan bersifat final. - pembeli lainnya adalah Rp. 650,- per kuintal dan bersifat tidak final. - Tepung terigu kepada : - penyalur adalah Rp. 57,- per zak, dan bersifat final. - grosir adalah Rp. 38,- per zak dan bersifat final. - pembeli lainnya adalah Rp. 91,- per zak dan bersifat tidak final.

#### 2.2.19. Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ketentuan dalam pasal 23 Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas: badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi : akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas), orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah: a. Dividen. b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. c. Royalti. d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21. e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Pengecualian penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah: a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana. e. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh

Koperasi kepada anggotanya.

Tarif pemotongan Pph pasal 23 adalah sebesar 15% dari jumlah bruto, kecuali untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dalam pasal 21 adalah dihitung dari neto.

Disamping itu juga berlaku PPh pasal 23 yang bersifat final, yaitu atas penghasilan sewa tanah/bangunan sebesar 6% dan 10% yang dihitung dari bruto, usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan yang besarnya 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi, 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, 4% untuk jasa konsultan (selain konsultan hukum dan konsultan pajak) yang dihitung dari bruto.

#### 2.2.20. Pajak Penghasilan Pasal 24.

Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak penghasilan atas seluruh penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri diatur dalam pasal 24 Undang Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak

atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut *tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan *per country limitation*.

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut: a. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. b. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. c. Penggabungan penghasilan yang berupa deviden (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### 2.2.21. Pajak Penghasilan Pasal 25.

Ketentuan pasal 25 Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara: a. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25). b. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23 dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan/dipungut (yang tidak bersifat final) serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Beberapa masalah untuk menghitung besarnya PPh pasal 25 dapat dirinci sebagai berikut : a. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pph. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. b. Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT. Apabila angsuran pajak sesuai SKP lebih besar daripada angsuran pajak sesuai SPT, maka besarnya angsuran pajak Pph pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir. c. Apabila tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya. Apabila angsuran pajak menurut SKP lebih besar daripada angsuran pajak bulan sebelumnya berdasar ayat PPh pasal 25 ayat 1,2, atau 3, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP. d. Angsuran PPh

pasal 25 jika SPT tahunan PPh lebih bayar.

Jika SPT tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

Dalam hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran Pph pasal 25 Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan, apabila :

- a. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
- b. Wajib pajak memperoleh penghasilan teratur.
- c. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- d. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan Pph.
- e. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

#### 2.2.22. Pajak Penghasilan Pasal 26.

Ketentuan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan). Yang dikenakan pemotongan PPh



pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 26 adalah : a. Dividen; b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. c. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. e. Hadiah dan penghargaan. f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. g. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. h. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi. i. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu bentuk usaha tetap kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok obyek PPh pasal 26 seperti berikut : a. Atas penghasilan yang berupa : - Dividen; - Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. - Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. - Hadiah dan penghargaan. - Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah penghasilan bruto. b. Atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi dipotong

PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto. c. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu badan usaha tetap di Indoneisa, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia, dikenakan tarip pemotongan sebesar 20%.

### **2.3. Sistem *Self-assessment*.**

Didalam sistem pemungutan pajak dikenal ada beberapa sistem pemungutan, yaitu :

2.3.1. *Sistem Official Assessment*. Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada *fiscus*. *Fiscus* berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi, dalam sistem ini, para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan *fiscus* mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh pada *fiscus* untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besarnya pajak, seringkali terjadi tawar-menawar antara *fiscus* dan wajib pajak. Kesempatan diatas memang terbuka lebar, karena dalam sistem ini petugas pajaklah yang menandatangani masyarakat untuk mendaftar warga masyarakat sebagai wajib pajak.

### 2.3.2. Sistem *Semi Self Assessment* dan sistem *Withholding*.

*Semi self-assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan *fiscus*. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh *fiscus*. Di Indonesia sistem *semi self-assessment* diterapkan bersama-sama dengan sistem *withholding*, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS dan MPO. *Withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh *fiscus* maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh *fiscus*. Penerapan sistem ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baik daripada sistem pemungutan yang sebelumnya, namun disana-sini masih di temukan penyelewengan oleh oknum pajak, seperti misalnya pembayaran pajak atas dasar kompromi dengan pengertian "tau sama tau" dimana *fiscus* sering menawarkan jasa penghitungan pembayaran pajak asal pihak yang

dibantu dapat saling mengerti. Yang dimaksud dengan tata cara MPS dan MPO adalah suatu tata cara Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang. Seperti dijelaskan di atas perhitungan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan atau perkiraan mengenai besarnya utang pajak yang terutang. Dalam tata cara MPS masyarakat harus menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan dan labanya berikut pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas negara tanpa campur tangan aparat pajak. Sementara kegiatan aparat pajak terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penelitian dan pemeriksaan perhitungan dan penyetoran pajak kepada wajib pajak pada akhir tahun takwim. Sehubungan dengan perhitungan dengan sistem MPS diatas dan demi terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu dan kondisi yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlu adanya sistem MPO untuk melengkapi pelaksanaan tata cara MPS. Tata cara MPO adalah suatu tata cara untuk menghitung pajak orang lain berikut melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara dengan menunjuk perorangan atau badan-badan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang berwenang.

#### 2.3.3. Sistem *Full Self-Assessment*.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem

pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Sistem ini dikenal dengan sebutan *full self-assessment system*. Dari pengertian ini jelas bahwa penekanannya adalah wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutanganya tanpa campur tangan dari *fiscus*. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Sebelum diberlakukannya sistem ini, seperti sudah diuraikan diatas, di Indonesia diberlakukan sistem *official assessment* dan selanjutnya sistem *semi self-assessment* dan sistem *withholding* yang dikenal dengan sistem MPS dan MPO-nya. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan oleh sistem-sistem tersebut, maka kita sekarang menggunakan sistem *full self-assessment*. Konsekuensi dari dijalankannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika terjadi salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Untuk mengetahui hal-hal tersebut diatas masyarakat harus rajin membaca dan berkonsultasi sampai mereka mengerti betul masalah ini. Hal ini perlu dilakukan

karena banyak sekali terminologi khusus yang digunakan dalam buku-buku panduan perpajakan, yang butuh penjelasan khusus untuk bisa mengertinya (Rimsky K. Judisseno, 2001 : 3-5).

Sistim *self-assessment* Pada Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 yang berarti bahwa ciri ciri dan corak sistim pemungutan pajak adalah sistim menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Penjelelasan UU No.8 Th. 1983).

Berdasarkan sistem *self-assessment* yang dianut dalam Undang Undang Pajak Penghasilan pula, setiap wajib pajak mempunyai kewajiban : a. Mendaftarkan diri ke Kantor pelayanan Pajak diwilayah mana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal guna mendapatkan NPWP; b. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar paja dalam tahun berjalan baik dengan menyettor sediri maupun pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, serta c. Mengambil dan menyampaikan sendiri SPT Tahunan mengenai penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak (Dirjen Pajak, 2002 : 1).

Penghitungan dan penetapan pajak terutang oleh wajib pajak tertuang dalam surat pemberitahuan (SPT) tanpa campurtangan pihak *fiscus*. Apabila dalam penghitungan dan penetapan pajak setelah

dikurangi dengan pemotongan pajak oleh pihak ke-3 dan/atau pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak masih ada pajak yang kurang dibayar, maka kekurangan tersebut harus sudah dilunasi oleh wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak yang bersangkutan lewat.

## **B A B III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan.**

Di Kabupaten Demak terdapat Kantor Pelayanan Penyuluhan Pajak, yang mempunyai tugas-tugas memberikan penyuluhan perpajakan dan menerima laporan-laporan perpajakan dari wajib pajak. Diluar tugas-tugas tersebut merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak Wialayah Semarang Timur. Hal ini disebabkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli Tahun 2001 dan Kep-58/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Tentang Perubahan Kode dan Nama Kantor Pelayanan Pajak, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Demak adalah merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Wialayah Semarang Timur.

Untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Demak kami ambil sampel terhadap 50 wajib pajak perorangan yang terdiri dari 5 orang Pegawai Negeri Sipil, 5 orang ABRI, 15 orang pengusaha perdagangan barang, 5 orang pengusaha perdagangan jasa, 10 orang pengusaha industri, 5 orang dokter dan 5 orang notaris.



### 3.1.1. Jumlah Wajib Pajak Perorangan Yang Telah Terdaftar Di Kabupaten Demak.

Sampai dengan tutup tahun 2001 jumlah wajib pajak perorangan yang telah terdaftar di Kabupaten Demak sebanyak : 1.946 Jumlah tersebut dihitung berdasarkan jumlah penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur.

### 3.1.2. Pendaftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian kami terhadap 50 orang wajib pajak dalam hal kewajiban wajib pajak perorangan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka dapat dirinci sebagai berikut :

5 orang responden dari PNS, yang terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak 1 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 4 orang.

5 orang responden ABRI, yang terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak

2 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 3 orang.

15 orang responden dari pengusaha perdagangan barang, yang terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak 13 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 2 orang.

5 orang responden dari pengusaha perdagangan jasa, yang terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak 4 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 1 orang.

10 orang responden dari pengusaha industri, yang terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak 7 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 3 orang.

5 orang responden dari notaris, semuanya terdaftar dan memiliki NPWP.

5 orang responden dari dokter, yang terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak 4 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 1 orang.

Dari hasil penelitian dengan mengambil sampel 50 responden wajib pajak perorangan tersebut bahwa yang melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah sebanyak 36 orang wajib pajak perorangan.

Untuk mengetahui secara jelas tentang kepatuhan wajib pajak perorangan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Wajib Pajak	Jumlah Responden	Sudah Punya NPWP	Belum Punya NPWP
1.	PNS	5	1	4
2.	ABRI	5	2	3
3.	Pedagang Barang	15	13	2
4.	Pedagang Jasa	5	4	1
5.	Usaha Industri	10	7	3
6.	Notaris	5	5	5
7.	Dokter	5	4	1
Jumlah :		50	36	14

Sumber Data : Data Primer.

### 3.1.3. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap wajib pajak harus mengisi SPT tahunan serta menyampaikan ke Dirjen Pajak.

Dalam hal pengisian SPT Tahunan, berdasarkan data di lapangan para wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak (yang diwakili 36 responden) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

### 3.1.3.1. Mengisi SPT Sendiri.

Dari 36 responden terdapat hanya 9 wajib pajak yang mengisi SPT-nya sendiri. Dari 9 wajib pajak tersebut yang 6 wajib pajak SPT-nya belum ada kegiatan (NIHIL), dan yang 3 wajib pajak SPT-nya menimbulkan kewajiban membayar pajak terutang. Bagi yang SPT-nya NIHIL, hal ini disebabkan adanya alasan-alasan :

- Bisa Mengisi dan Mempunyai Kegiatan Usaha Namun Takut Salah;

Hal ini dapat dilihat dari data lapangan dimana terdapat 2 wajib pajak perorangan mempunyai kegiatan usaha namun pengisian SPT sama sekali tidak mencerminkan adanya suatu kegiatan usaha.

- Ada kegiatan usaha namun pendapatannya di bawah Penghasilan Kena Pajak (PTKP),

Hal ini dapat dilihat dari data lapangan terdapat 2 orang wajib pajak perorangan dimana usaha yang masih berjalan dan data arsip SPT wajib pajak perorangan yang mencerminkan adanya suatu kegiatan usaha yang menghasilkan namun penghasilan tersebut setelah dikurangi dengan PTKP masih dibawahnya.

- Benar-benar tidak ada kegiatan dan penghasilan lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari data lapangan terdapat 2 wajib pajak perorangan yang memang benar-benar tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak mendapat penghasilan lain.

### 3.1.3.2. SPT Di Isi Oleh Pihak Lain (Bukan Kuasa).

Berdasarkan data dari pengakuan 22 wajib pajak, pada SPT ini adalah yang SPT-nya menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak maupun yang tidak menimbulkan kewajiban membayar pajak dan bagi 16 wajib pajak yang SPT-nya menimbulkan pajak maka pajak tersebut sudah dibayar didepan, dengan maksud agar wajib pajak selama tahun berjalan tidak usah melaporkan SPT masa pada setiap bulannya. Sedangkankan bagi 6 wajib pajak yang SPT-nya tidak menimbulkan kewajiban membayar pajak maka setiap bulannya tetap harus melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak walaupun nihil.

Pada pengisian SPT ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- SPT yang menimbulkan kewajiban membayar pajak terutang.

Jumlah pajak terutang tersebut dibayar dimuka (tidak diangsur setiap bulannya).

- SPT yang nihil.

Pada SPT ini walaupun pengisiannya diserahkan kepada orang lain (bukan kuasa) namun pengisiannya tetap nihil, karena memang wajib pajak perorangan mempunyai alasan tidak ada waktu

untuk mengerjakannya. Pada SPT ini tentunya berakibat tidak ada pajak yang terutang, namun demikian sebagai konsekwensinya wajib pajak tetap harus menyampaikan SPT masa setiap bulannya.

#### 3.1.3.3. SPT tidak diisi/dibiarkan.

Hal ini disebabkan karena :

- Wajib pajak tidak bisa mengisi;

Berdasarkan data dilapangan pada alasan ini terdapat 1 orang wajib pajak yang tidak dapat mengisi karena wajib pajak belum pernah mendapatkan bimbingan secara langsung/terarah dari fiskus tentang pengisian formulir SPT.

- Wajib pajak sibuk.

Dari data hasil penelitian dilapangan terdapat 1 wajib pajak perorangan yang SPT-nya tidak diisi dengan alasan bahwa wajib pajak sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk itu.

- Wajib pajak sengaja tidak mengisi.

Berdasarkan data dilapangan pada alasan ini terdapat 3 wajib pajak yang menyengaja untuk tidak mengisi SPT-nya. Mereka memilih untuk diberi sanksi yang berupa didenda, dari pada harus mengisi dan mengirim/menyampaikan SPT-nya.

Dari sample 36 responden di lapangan maka atas pengisian SPT ini dapat ditabulasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAHWAJIB PAJAK	PROSEN- TASI	KET.
I.	- SPT NIHIL DI ISI SENDIRI	6	16.67	ORANG LAIN BUKAN KUASA
	- SPT NIHIL DI ISI ORANG LAIN	6	16.67	
II.	SPT BAYAR DI ISI ORANG LAIN	16	44.44	
III.	SPT BAYAR DI ISI SENDIRI	3	8.33	
IV.	TIDAK MENGISI	5	13.89	
	JUMLAH :	36	100	

Sumber data : Data Primer

#### 3.1.4. Penyelenggaraan Pembukuan Atau Pencatatan.

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak untuk melaksanakan pembukuan atau pencatatan dalam pengelolaan usahanya (sesuai Pasal 28 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dapat di rinci sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pembukuan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 31 Wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak yang menyelenggarakan pembukuan adalah tidak ada. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa belum bisa melaksanakan pembukuan.

- Penyelenggaraan Pencatatan.

Berdasarkan hasil penelitian, 31 responden wajib pajak perorangan didalam menentukan peredaran brutonya, dari sejumlah responden tersebut adalah menggunakan perhitungan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan. Pada penggunaan norma perhitungan ini wajib pajak harus didukung dengan pencatatan-pencatatan.

Dari hasil penelitian, 31 wajib pajak di Kabupaten Demak adalah belum menyelenggarakan pencatatan-pencatatan sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan perpajakan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 28, Ayat 3).

Hal ini disebabkan adanya alasan-alasan :

- Wajib pajak tidak ada waktu karena sibuk.
- Wajib pajak takut jika pencatatan itu diketahui oleh fiskus.
- Wajib belum memahami ketentuan perpajakan.



### 3.1.5. Penerapan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Oleh Wajib Pajak.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Bagi wajib pajak perorangan yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak tersebut sesuai Pasal 14 Ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan wajib pajak perorangan boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan. Norma penghitungan penghasilan neto hanya boleh digunakan oleh wajib pajak perorangan/orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Kepada wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Dari hasil penelitian terhadap 31 wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak, tidak semua wajib pajak tersebut didalam menentukan penghasilan netonya mesti menggunakan norma penghitungan penghasilan. Hal ini didasarkan bahwa kenyataan dilapangan bahwa berdasarkan informasi 3 wajib pajak perorangan tersebut sebetulnya peredaran brutonya dalam satu tahun pajak melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Ketiga orang tersebut adalah : H. Soetrimo, Desa Bolo – Demak, H. Anwar, Desa Bolo – Demak, Subur, Desa Trengguli – Kecamatan Wonosalam, Demak.

Menurut keterangan dari ke-3 wajib pajak tersebut disebabkan adanya alasan-alasan sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak tidak tahu akan hal tersebut;
- Ada kesepakatan antara pihak lain (bukan kuasa) yang diserahkan wajib pajak untuk mengisi SPT-nya dengan wajib pajak, dengan maksud agar ke 3 wajib pajak tersebut tidak usah membuat pembukuan yang dianggap merepotkan oleh wajib pajak.

### 3.1.6. Kesadaran/Kejujuran Wajib Pajak Dalam Mengisi SPT Secara Benar/Apa adanya dan Lengkap.

Sesuai Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta

penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dengan benar, jujur, jelas dan lengkap.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa semua responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam menentukan penghasilan netonya adalah menggunakan norma perhitungan. Untuk mengetahui tingkat kesadaran/kejujuran wajib perorangan di Kabupaten Demak dalam mencantumkan penghasilannya di SPT dapat dirinci sebagai berikut :

- Pengisian Harta dan Hutang Yang Dimiliki.

Dari 31 responden dalam kesadaran/kejujuran mengisi SPT terdapat 19 SPT dari wajib pajak yang tidak menunjukkan adanya hutang, padahal berdasarkan informasi dari wajib yang bersangkutan sebenarnya para wajib pajak tersebut punya hutang, hal ini disebabkan karena pengisiannya diserahkan kepada pihak lain. Demikian juga mengenai pencantuman harta yang dimiliki juga tidak sesuai dengan data dilapangan.

- Pengisian Peredaran Bruto.

Dari hasil penelitian dilapangan terhadap 31 responden wajib pajak perorangan tentang pengisian peredaran bruto pada SPT-nya terdapat 7 responden pedagang dan 7 responden pengusaha industri dalam menentukan peredaran bruto per tahunnya pada SPT tidak

sesuai dengan informasi/pengakuan mereka. Ke-14 responden tersebut mestinya SPT-nya peredaran brutonya melebihi dari SPT yang telah dicantumkan. Hal ini disebabkan pengisian SPT-nya diserahkan kepada pihak lain.

**- Pencantuman Penghasilan Yang Diperoleh Dari Luar Kegiatan Usahanya.**

Obyek pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam tahun berjalan adalah tidak hanya penghasilan yang terkait dengan kegiatan usahanya saja, tetapi juga penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dari luar kegiatan usaha yang dijalankan, antara lain bisa berupa penghasilan dari : bunga, deviden, properti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan lain-lain.

Dari hasil penelitian terhadap 31 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak ternyata semua responden tersebut belum mencantumkan penghasilan lain yang diperoleh di luar usahanya pada SPT-nya. Hal ini disebabkan adanya alasan bahwa wajib pajak takut kalau penghasilan yang dicantumkan pada SPT besar maka pajaknya akan menjadi besar pula.

**3.1.7. Kejujuran Wajib Pajak Perorangan Dalam Mencantumkan Pajak Penghasilan Yang Di Pungut Oleh Pemungut/Pemotong Pajak Penghasilan Pada SPT.**

### **Pajak Penghasilan Pasal 21.**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- Pejabat Negara;
- Pegawai Negeri Sipil;
- Pegawai;
- Pegawai tetap;
- Pegawai Lepas;
- Penerima Pensiun;
- Penerima Honorarium;
- Penerima Upah.

Dari 31 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam hal pencantuman penghasilan ini hanya terdapat 3 wajib pajak yang berstatus penerima penghasilan seperti dimaksud diatas adalah 3 (1 PNS, 2 ABRI).

Penghasilan yang menjadi obyek pajak Pasal 21, seperti :

- Gaji;
- Honorarium;
- Uang lembur;
- Uang transport, dan
- Tunjangan-tunjangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan 3 responden tersebut dan bukti pencantuman di SPT dari wajib pajak yang bersangkutan belum mencantumkan adanya potongan/pengutan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 21.

#### **Pajak Penghasilan Pasal 22.**

Yang merupakan obyek pengutan PPh Pasal 22 adalah :

- Impor barang;
- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif;
- Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- Penyerahan gula pasir dan tepung terigu Badan Urusan Logistik.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tidak satu pun responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak yang melakukan aktifitas yang menjadi obyek pemungutan PPh pasal 22.

### **Pajak Penghasilan Pasal 23.**

Obyek pajak penghasilan Pasal 23 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Secara rinci tentang jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak perorangan dapat di rinci sebagai berikut :

- Dividen;
- Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- Royalti;
- Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pph sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Berdasarkan data lapangan, terdapat 4 wajib pajak perorangan pengusaha perdagangan barang yang melakukan kegiatan yang memperoleh penghasilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 yaitu penghasilan yang berupa :

- Perolehan bunga yang diterima wajib pajak;
- Perolehan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Tetapi didalam pengisian SPT wajib pajak tersebut tidak mencantumkan adanya pajak yang dibayar dari penerimaan tersebut. Hal ini menurut alasannya mereka merasa enggan bila potongan PPh dari pendapatan ini dicantumkan pada SPT.

#### **Pajak Penghasilan Pasal 24.**

Penghasilan wajib pajak perorangan yang memperoleh penghasilan yang dipotong sesuai dengan Pasal 24 adalah wajib pajak yang mendapat penghasilan di luar negeri dan telah dipotong diluar negeri.



Berdasarkan data yang diperoleh dari ketetapan 31 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak adalah tidak satupun wajib pajak dimaksud yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong diluar negeri.

#### **Pajak Penghasilan Pasal 25.**

Obyek pajak penghasilan Pasal 25 adalah besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Besar angsuran pajak tersebut adalah ditentukan dalam SPT tahun lalu.

Pembayaran pajak Pasal 25 dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan jalan :

- Wajib pajak membayar sendiri (Pasal 25);
- Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga (PPh Pasal 21, 22, 23, 24).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 31 responden wajib pajak perorangan tentang PPh pasal 25, terdapat 19 wajib pajak perorangan yang SPT tahun lalunya menunjukkan besarnya pajak yang harus diangsur namun angsuran pajak Pasal 25 tersebut sudah dibayar dimuka.

## **Pajak Penghasilan Pasal 26.**

Obyek pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap 31 wajib pajak perorangan tentang pecantuman potongan PPh yang telah dipungut oleh pihak lain pada SPT-nya adalah tidak ada.

Hal ini disebabkan bahwa terhadap 31 responden yang memperoleh penghasilan sebagaimana yang dimaksud Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah tidak ada.

### **3.1.8. Penyampaian SPT.**

#### **SPT Tahunan.**

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 Huruf b Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila SPT tersebut tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- ( Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang No. 16 Tahun 2000).

Pada SPT ini disampaikan dengan cara :

- Untuk SPT bayar.

Sebanyak 3 wajib pajak menyampaikan SPT-nya melalui Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak dan yang lainnya disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur.

- Untuk SPT nihil.

Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur melalui Kantor Pos dan Giro Kabupaten Demak dan Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak maupun Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur.

Berdasarkan data dilapangan dari 36 wajib pajak di Kabupaten Demak , terdapat 28 wajib pajak yang menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur dan yang 3 wajib pajak menyampaikan SPT-nya ke Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak. Sedangkan yang 5 wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, hal ini disebabkan mereka belum mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan mereka belum pernah menerima sosialisasi baik dari fiskus maupun dari pihak lain.

Untuk mengetahui data mengenai penyampaian SPT tahunan, adalah

sebagai berikut :

NO	TAHUN	DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU	DISAMPAIKAN TERLAMBAT	TIDAK DISAMPAIKAN	KETE RA- NGAN
	1999	31	-	5	
	2000	31	-	5	
	2001	31	-	5	
	JUMLAH :	93	-	15	

Sumber Data : Data Primer.

SPT Masa.

Sesuai Pasal 3 Ayat 5 huruf a, batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Penyampaian SPT masa dapat berakibat sebagai berikut :

- Besarnya pajak diangsur.
- Pajak nihil.

SPT masa lahir setelah adanya perhitungan SPT tahunan, dari SPT tahunan inilah kemudian timbul :

- Angsuran pajak.
- Pajak nihil.

Untuk mengetahui data mengenai penyampaian SPT masa bagi wajib pajak di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SPT DISAMPAIKAN	SPT TIDAK DISAMPAIKAN	KET.
1.	SPT masa nihil	12	-	
2.	SPT masa bayar :			
	a. Dimuka	19	5	
	b. Diangsur	-	-	
	JUMLAH :	31	5	

Sumber Data : Data Primer.

### 3.1.9. Pembayaran Pajak.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan bagi 31 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak yang SPT-nya menimbulkan pembayaran pajak, dalam membayar pajak tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Semua responden wajib pajak perorangan yang SPT tahunannya

menimbulkan pajak terutang dalam membayar pajaknya adalah dibayar dimuka, bukan diangsur. Dengan demikian tidak ada responden wajib pajak di Kabupaten Demak yang mengangsur pajak terutangnya pada setiap bulannya.

Hal ini disebabkan para wajib pajak tidak mau direpotkan untuk mengangsur pajak pada setiap bulannya, dan wajib pajak beranggapan akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda jika sampai tidak menyampaikan laporan masa setiap bulannya.

### **3.2. Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan Perpajakan Berkaitan Dengan Sistem *Self-assessment*.**

#### **3.2.1. Pemahaman Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan Perpajakan.**

Ketentuan yang mengatur tata cara perpajakan dan pajak penghasilan di Indonesia adalah :

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang  
Undang Nomor : 17 Tahun 2000.

Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman wajib pajak perorangan  
terhadap pemahaman ketentuan perpajakan di Kabupaten Demak  
berdasarkan penelitian lapangan bahwa peneliti telah melakukan  
wawancara dengan 36 responden (wajib pajak perorangan ) dengan  
hasil sebagai berikut :

NO.	RESPONDEN	MEMAHAMI KETENTUAN PERPAJAKAN	TIDAK MEMAHAMI KETENTUAN PERPAJAKAN	KET.
1	36 WP Perorangan	3 WP	33 WP	
	JUMLAH :	3 WP	33 WP	

Sumber Data : Data Primer.

Kondisi ini berdasarkan keterangan wajib pajak perorangan di  
sebabkan belum adanya sosialisasi terarah mengenai ketentuan  
perpajakan, baik dari Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak,  
maupun Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur. Disamping  
itu juga disebabkan kemampuan wajib pajak perorangan yang kurang

mendukung, hal ini terbukti dari 33 wajib pajak tersebut terdapat 21 wajib pajak yang latar pendidikannya hanya SLTP.

### 3.2.2. Pemahaman Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Sistem *Self-Assessment*.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemahaman responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak terhadap ketentuan perpajakan adalah belum memahami ketentuan perpajakan, hal ini terbukti dari keterangan 36 responden ternyata yang 33 responden menyatakan belum tahu sama sekali tentang ketentuan perpajakan. Padahal didalam ketentuan tersebut sistim perpajakan *self-assessment* ada didalamnya. Untuk mengetahui data tentang pemahaman wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan sistim perpajakan *self-assessment* adalah sebagai berikut :

NO.	JUMLAH RESPONDEN	MENGAMBIL SPT TAHUNAN SENDIRI	MENGHITUNG PAJAK SENDIRI	MENGIRIM SPT/MEMBAYAR PAJAK SENDIRI
1	36 WP Perorangan	9 WP Perorangan	9 WP Perorangan	9 WP Perorangan
	JUMLAH :	9	9	9

Sumber Data : Data Primer.



### 3.2.3. Pemeriksaan Pajak.

Yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur. Sedangkan di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur sampai dengan tutup tahun 2001 terdapat wajib pajak perorangan sejumlah: 1.946 wajib pajak.

Mengingat begitu banyaknya wajib pajak perorangan diwilayah tersebut maka pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan sebatas pada :

#### **Pemeriksaan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak.**

Terhadap SPT Tahunan yang telah masuk di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur diperiksa kebenaran pengisiannya.

#### **Pemeriksaan Lapangan.**

Jika dipandang perlu terhadap SPT tahunan nihil maupun SPT tahunan yang menimbulkan utang pajak fiskus dapat melaksanakan pemeriksaan dilapangan (SK. Menteri Keuangan No.545/KMK/04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak).

Pemeriksaan dimaksudkan untuk menguji kebenaran, kepatuhan dan kejujuran wajib pajak didalam mengisi SPT tahunan.

Untuk mengetahui hasil pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dapat dilihat data sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TH 1999	TH 2000	TH 2001	K E T
1.	Pemeriksaan SPT Tahunan	1.216	1.234	1.254	
2.	Pemeriksaan SPT Masa	1.812	1.874	1.946	
3.	Pemeriksaan Lapangan	-	-	3	

Sumber Data : KPP. Semarang Timur.

#### 3.2.4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Terhadap wajib pajak perorangan yang telah diperiksa, baik pemeriksaan SPT tahunan maupun pemeriksaan lapangan maka

sebagai hasil pemeriksaan tersebut adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

Untuk mengetahui data berapa banyak SKP yang diterbitkan oleh KPP Wilayah Semarang Timur adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TH 1999	TH 2000	TH 2001	KET.
1.	SKP Kurang Bayar	74	14	23	
2.	SKP Lebih Bayar	-	-	-	
3.	SKP Denda	426	502	549	
	JUMLAH :	500	516	572	

Sumber Data : KPP. Semarang Timur.

### 3.2.5. Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa.

Terhadap wajib pajak yang berdasarkan SKP namun tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah SKP maka di tindak lanjuti dengan surat tagihan pajak terutang. Jika suerat tagihan pajak terutang tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan yang dilakukan oleh

KPP Wilayah Semarang Timur selanjutnya adalah diterbitkan surat tagihan dengan surat paksa.

Untuk mengetahui berapa banyak surat tagihan dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Wilayah Semarang Timur terhadap wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dapat dilihat sbb :

NO	URAIAN	TH 1999	TH 2000	TH 2001	KET.
1	Surat Tagihan	244	176	144	
2	Surat Paksa	104	92	67	
	JUMLAH :	348	268	211	

Sumber Data : KPP Semarang Timur.

### 3.3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Menunjang Sistem Selfassessment Di Kabupaten Demak.

#### 3.3.1. Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT).

##### Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur pada setiap menjelang tutup tahun (antara bulan Nopember-Desember) selalu menyediakan SPT tahunan.

Sesuai *susten self-assessment* mestinya wajib pajak mengambil sendiri SPT tahunan yang telah disediakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua dari 36 responden wajib pajak tidak mengambil sendiri ditempat-tempat yang telah disediakan. Pengambilan SPT tahunan oleh wajib pajak perorangan ditempat dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

SPT tahunan yang diambil.

SPT tahunan yang diambil di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur maupun di Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak, yang mengambil adalah wajib pajak sendiri dan dikirim oleh fiskus langsung kealamat wajib pajak yang bersangkutan melalui jasa Kantor Pos dan Giro .

Namun pengambilan SPT tahunan ini jumlahnya hanya 9 SPT saja.

SPT Dirikim Langsung Kealamat Wajib Pajak.

SPT tahunan dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur ke alamat wajib pajak perorangan langsung sebanyak 37 SPT.

Untuk mengetahui data mengenai berapa banyak SPT tahunan sampai kepada wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN	PENGAMBILAN	PENGAMBILAN	KET.
		TAHUN 2000	TAHUN 2001	
1	Diambil Sendiri	9 WP	9 WP	
2	Diambil pihak lain	-	-	
3	Dikirim oleh Kantor Pajak	27 WP	27 WP	

Sumber Data : Data Primer.

#### **SPT masa.**

Bagi wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak, mengenai pengambilan SPT masa ini dapat diperinci sebagai berikut :

Bagi wajib pajak perorangan yang bayar.

Bagi wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak, cukup sekali saja menggunakan SPT masa, yaitu setelah SPT tahunannya

menimbulkan kewajiban bayar utang pajak kemudian pajak untuk tahun berjalan dibayar dimuka. Jadi hanya menggunakan SPT masa (surat setoran pajak) sekali saja, yaitu menggunakan SPT masa (surat setoran pajak) yang dilampirkan dalam SPT tahunan.

Bagi wajib pajak NIHIL.

Bagi wajib pajak NIHIL dapat dirinci sebagai berikut :

- Wajib pajak yang SPT tahunannya NIHIL tetapi wajib pajak tersebut mengirimkan laporan (walaupun nihil) setiap bulan, SPT masa-nya mengambil di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur maupun di Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak dimana wajib pajak mengirim laporan tersebut.
- Wajib pajak yang tidak mengirimkan laporan setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur maupun Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak. Wajib pajak yang tergolong ini berarti tidak menggunakan SPT masa sama sekali.

### 3.3.2. Menghitung Sendiri/Menetapkan Sendiri Besarnya Pajak Terutang.

Berdasar hasil penelitian lapangan terhadap 31 para wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak yang menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang adalah hanya 9 wajib pajak, sedangkan yang 22 wajib pajak dalam menghitung dan menetapkan pajak terutang diserahkan kepada pihak lain yang bukan

kuasa. Hal ini berlangsung terus menerus, bahkan menurut hasil penelitian, ketergantungan ini berlangsung terus.

Untuk mengetahui jumlah responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam hal menghitung dan menetapkan pajak terutang dapat diikuti data berikut :

NO	JUMLAH WAJIB RESPONDEN	MENGHITUNG SENDIRI	DIHITUNG OLEH ORANG LAIN	TIDAK MENGHITUNG
1	31	9	22	5
	JUMLAH :	9	22	5

Sumber Data: Data Primer.

### 3.3.3. Menyetor Sendiri Pajak Yang Terutang/Angsuran Pajak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian didepan, wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak yang membayar pajak terutang , baik bagi yang melaksanakan penghitungan sendiri maupun



dihitungkan oleh orang lain didalam penyetoran pajak tersebut berdasarkan penelitian ini disetor oleh wajib pajak perorangan sendiri sebanyak 9 wajib pajak dan 22 wajib pajak dibayar oleh pihak lain.

## **B A B IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Simpulan**

##### **4.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan.**

Ketentuan pelaksanaan Pajak penghasilan adalah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dari hasil penelitian terhadap 50 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak, yaitu yang terdiri dari unsur PNS, ABRI, Pedagang, industri dan usaha bebas ternyata yang belum mendaftarkan NPWP sebanyak 14 wajib pajak, atau sebanyak 28 %. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak perorangan tersebut telah mematuhi

ketentuan dimaksud.

Dalam hal pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan dari 36 responden wajib pajak yang telah memiliki NPWP terdapat 5 wajib pajak yang tidak mengisi dan mengirimkan SPT tahunan atau sebanyak 13,89 %. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak perorangan terhadap Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak telah mematuhi ketentuan dimaksud. Dari 5 wajib pajak yang tidak mengisi dan mengirimkan SPT tersebut terdapat 3 wajib pajak yang tidak mengirim SPT dengan alasan mereka sengaja memilih untuk di jatuhi sanksi denda. Hal ini berdasarkan analisa penyusun memang bahwa ketentuan sanksi tersebut adalah bisa dipakai oleh wajib pajak sebagai tindakan penghindaran/penggelapan pajak (*tax avoidance*) yang dibenarkan oleh undang-undang. Wajib pajak lebih suka diberi sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- dari pada harus mengisi dan mengirim SPT, padahal wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha, dan menurut analisa penyusun denda tersebut adalah diterapkan baik kepada wajib pajak perorangan maupun badan. Hal ini tentunya juga kurang sesuai dengan falsafah pajak, yaitu bahwa syarat yuridis dalam pembuatan undang-undang pajak harus memberikan keadilan (*equity*).

Penyelenggaraan pembukuan dan atau pencatatan merupakan keharusan untuk dilaksanakan oleh wajib pajak, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dari hasil penelitian terhadap 31 responden wajib pajak yang memiliki NPWP dan telah mengisi SPT tahunan ternyata yang menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah belum ada. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak terhadap Pasal 28 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah belum mematuhi.

Penyampaian SPT tahunan setelah diisi dengan benar, jujur, jelas dan lengkap adalah merupakan keharusan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat 5 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dari 36 wajib pajak ternyata yang mengirimkan tepat waktu sebanyak 31 wajib pajak atau sebanyak 86 % telah mematuhi ketentuan tersebut. Sedangkan dari sisanya sebanyak 14% terdapat 60% tidak menyampaikan karena alasan kesengajaan. Hal ini berarti sanksi denda Rp.100.000 sebagai dimaksud Pasak 7 UU No.16 Th. 2000 adalah belum membuat jera wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut, dengan demikian bekerjanya hukum masih dirasa ada hambatan.

#### 4.1.2. Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan Perpajakan Berkaitan Dengan Sistem *Self Assessment*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam hal pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan ternyata yang belum memahami ketentuan perpajakan sebanyak 27 wajib pajak atau sebanyak 75 %.

Dalam hal pemahaman wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan sistem *self-assessment* dari 36 responden ternyata yang melaksanakan sistem tersebut baru 9 wajib pajak saja, atau sebanyak 25 %.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak terhadap ketentuan perpajakan dan sistem *self-assessment* adalah masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan berkaitan dengan sistem *self-assessment* adalah rendah pula, sehingga 75 % wajib pajak perorangan yang tidak memahami tersebut mengakibatkan timbulnya pemeriksaan pajak oleh *fiscus* dan menimbulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan pajak serta Surat Paksa.

#### 4.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Menunjang Sistem *Self-assessment* Di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak yang telah memiliki NPWP dalam hal pelaksanaan sistem perpajakan *self-assessment* ini dapat dirinci sebagai berikut :

- 4.1.3.1. Dalam hal pengambilan SPT Tahunan, dimana setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak. Ternyata dari 36 responden hanya terdapat 9 wajib pajak saja, atau baru 25 %.
- 4.1.3.2. Demikian juga dalam hal menghitung sendiri dalam penetapan besarnya pajak yang harus diangsur/bayar juga hanya 9 wajib pajak yang melaksanakannya, atau hanya 25 % saja.
- 4.1.3.3. Dalam hal penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak dari 31 responden ternyata hanya 9 orang saja yang disetor oleh wajib pajak sendiri, dan yang 22 wajib pajak disetor oleh orang lain.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan *self-assessment* oleh wajib pajak di Kabupaten Demak masih rendah.

## **S a r a n.**

### **4.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan.**

Dari kesimpulan diatas dalam hal kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan dimana wajib pajak tersebut telah mematuhi ketentuan perpajakan. Dari hasil penelian tersebut dalam hal pengisian dan penyampaian SPT tahunan dari 31 wajib pajak, sedangkan yang 5 wajib pajak yang tidak mengisi dan menyampaikan SPT-nya terdapat 3 wajib pajak yang dengan alasan sengaja untuk memilih menerima sanksi denda sebesar Rp. 100.000,-. Dari kenyataan ini dan dari hasil analisa penyusun atas Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memang merupakan *loophole* atau celah untuk dapat dipakai wajib pajak untuk menghindari maupun menggelapkan pajak, karena dengan denda yang hanya Rp. 100.000,-, berarti wajib pajak sudah tidak lagi menghitung berapa besar pajak yang akan terutang dan ketentuan tersebut adalah kurang mencerminkan keadilan, dimana wajib pajak adalah terdiri dari perorangan dan badan, tetapi kenapa sanksi denda tersebut besarnya sama, mestinya berbeda antara perorangan dengan badan. Untuk itu kami sarankan kepada

pembuat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan agar sanksi berupa denda tersebut diperbesar agar tidak memberikan celah kepada wajib pajak (badan maupun perorangan) untuk menghindari maupun menggelapkan pajak dan ada perbedaan besarnya sanksi denda antara wajib pajak perorangan dan badan, mestinya yang wajib pajak badan yang lebih besar agar mencerminkan keadilan. Terhadap wajib pajak yang dengan kesengajaan secara terus-menerus tidak menyampaikan SPT tahunan tersebut kami sarankan agar supaya hukum dapat dipatuhi tentunya harus bersandar pada mekanisme penegakan hukum yang lain. Disini hukum kembali pada bentuk yang sederhana yaitu bentuk yang memaksa dan menekan melalui dikenakannya sanksi yang lebih berat, yaitu dengan cara merubah sanksi denda bagi yang tidak menyampaikan SPT tahunan yang semula hanya Rp. 100.000 menjadi 10 kali dari pajak yang terutang, yaitu tentunya setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan. Hal ini tentunya lebih pasti dan mengikuti perkembangan waktu nilai nominal denda. Dengan demikian hukum disini akan lebih menjadi pasti dan mampu mengakomodasi terhadap perkembangan jaman dan dapat diterapkan secara konsekwen untuk keadaan yang sama secara terus-menerus.

Sedangkan yang mengisi dan menyampaikan SPT tahunan terdapat 22 wajib pajak dalam hal ini masih ditangani oleh pihak lain.



Untuk itu kami sarankan agar pihak fiskus terus meningkatkan/mengupayakan bimbingan/pembinaan terhadap wajib pajak tersebut agar mampu melaksanakan sendiri masalah perpajakannya, sehingga sistem perpajakan *self-assessment* dapat terwujud.

#### 4.2.2. Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan Perpajakan Berkaitan Dengan Sistem *self-assessment*.

Dari kesimpulan diatas bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan adalah masih rendah, yaitu dari 36 responden hanya 9 wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan. Dengan demikian yang memahami sistem perpajakan *self-assessment* adalah hanya 25 % saja, sehingga mereka tidak bisa mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan mereka belum pernah memperoleh sosialisasi terarah masalah ketentuan perpajakan, untuk itu kami sarankan kepada fiskus agar meningkatkan sosialisasi atas pelaksanaan ketentuan perpajakan secara intensif dan terarah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan atas sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada wajib pajak tersebut supaya di tinjau kembali, disini yang paling esensi adalah bagaimana agar supaya mereka betul-betul memahami ketentuan perpajakan terlebih dahulu.

#### 4.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Menunjang Sistem *Self-assessment* Di Kabupaten Demak.

Dari kesimpulan mengenai pelaksanaan sistem perpajakan *self-assessment* oleh wajib pajak diatas dimana dalam hal pengambilan SPT tahunan 36 responden hanya 25 % saja yang melaksanakannya. Dalam hal menghitung dan menyetor pajak sendiri dari 36 responden hanya 25 % saja yang melaksanakan sistem perpajakan *self-assessment*. Untuk itu kami sarankan agar dari keadaan yang demikian agar kepada fiskus juga memperbanyak pengarahan/bimbingan terhadap wajib pajak secara gradual, efektif dan efisien, sehingga secara bertahap wajib pajak mampu melaksanakan sistem perpajakan *self-assessment*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sritua, *Pembangunaisme dan Ekonomi Indonesia*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1986.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Rineksa Cipta, Jakarta, 1998.
- Barata Atep A. Zulafdi Ardian, *Perpajakan*, Bandung : CV. Armico, 1989.
- Boediono, B. *Administrasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Yayasan Kawula Indonesia, 1988).
- Brotodihardjo R, Santosa, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- , *Ilmu Ilmu Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- Blau, Peter M. & Marshall Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2000.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Dajan Anto, *Pengantar Metode Statistik*, Jilid I, II, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Dirjen Pajak, *Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 2001.
- Feridhanusetyawan, Tubagus, *Liberalisasi Perdagangan Dunia: Bagaimana Manfaatnya Bagi ASEAN ?*, Analisis CSIS Tahun XXVII, 1998.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang, 1990.
- Gunadi, *Perpajakan*, Rinekacipta, Jakarta, 2001.

Gerald Turkel, *Law And Society (Critical Approaches)* -University Of Delaware, 1996.

Hoeve, W. Van, *Kamus Belanda - Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta 1992.

Hartono Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Bandung, 1988.

Hovland, Carl. I., Janis, Irving.L., and Kelley, Harold. H. *Communication and Persuasion : Psychological Studies on Opinion Change*, New Haven : Yale University Press, 1968.

Hidayat Arief, *Masalah Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum*, Masalah Hukum HUKUM Majalah Fakultas Hukum UNDIP No. 5 Tahun 1993.

Kantor Statistik Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka*, 2001.

Kartasasmita, Husein, *Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan 1984*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1994.

Kartoprandjono, Moedjiono, *Sanksi Sanksi Perpajakan dan Penerapannya*, Makalah pada Dies Natalis FISIP UI Ke-XXXVIII, 1987.

Keraf, Gorys, *Eksposisi dan Diskripsi* (Cetakan II) Nusa Indah, Flores, 1982.

-----, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa* (Cetakan IX), Nusa Indah, Flores, 1993.

-----, *Eksposisi, Komposisi Lanjutan II*, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995.

Kelman, Herbert C., *Compliance, Identification and Internalization, Three Processes of Attitude Change*, H. Proshansky and B. Seideberg (eds). *Basic Studies In Social Psychology*. New York : Holt, Rhinehart and Wiston, 1966.

Marpaung, Charles D dan G. Nyoman Putera, *Dasar Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta, Integritas Press 1985.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2001.

Masjhuri Showam , *Study Analisis Antara Profil Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1998.

Mowrer, O. Hobart, *Learning Theory and Personality Dynamics*, New York : The Ronald Press Company, 1950.

Miyasto, *Kuliah Reguler Hukum Pajak*, 2000.

Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law And Society In Toward Responsive Law*, Hasper Colaphan Books, Hasper & Row Publiser, New York

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.

-----, dan M. Thomas, *Buku Penuntun Pembuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Peters, AAG dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (buku teks Sosiologi Hukum, I, II, III)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

Prawiro, Radius, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 1998.

Prospisil, Leopold, *Anthropology Of Law, A Comparatif Theory*, New York : Harper & Row Publishers, 1971,

Pieget, J. *The Moral Judgment Of The Child*, New York, The Fee Press, 1948.

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang, 2001.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (terjemahan)*, Alimadan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Rahardjo Satjipto , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.

-----, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, Yayasan Penerbit, Fk. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1976.

-----, *Metodologi Research, Jilid 3*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1975.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

-----, *Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan* (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Di Desa Podorejo, Kecamatan Tugu, Kota Madia Semarang), Ringkasannya dipublikasikan dalam Majalah Masalah Masalah Hukum Nomor 6 Tahun 1993.

Sudjana, *Metode Statistika*, Tarsito, Bandung, 1975.

Sanusi Bintang, dkk, *Pokok Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Salamun AT, *Pajak, Citra dan Bebannya*, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1990.

Sidharta Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Sumantoro, *Aspek Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1977.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

-----, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Widjaya Tunggal Amin, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Republik Indonesia, Undang Undang No. 6 Tahun 1983, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Sebagaimana beberapakali telah diubah, yang terakhir dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya.

-----, Undang Undang No. 7 Tahun 1983, *tentang Pajak Penghasilan*, Sebagaimana beberapakali telah diubah, yang terakhir dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya.

-----, Undang Undang No. 8 Tahun 1983, *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, sebagaimana beberapakali telah diubah, yang terakhir dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya.

-----, Undang Undang No. 21 Tahun 1997, *Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2000.

-----, Undang Undang No. 19 Tahun 1997, *tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 19 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya.

-----, Undang Undang No. 19 Tahun 2001, *Tentang APBN 2002*.